



**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP  
*INTEGRATED REPORTING***

**(Studi Kasus pada Perusahaan Index LQ-45 yang Terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia Periode 2020-2023)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah  
satu tugas akademik dan melengkapi syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi, program  
studi S1 Akuntansi Universitas Krisnadwipayana

**ADELIA SALSABILLA**

**2134031042**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**JAKARTA**

**JUNI 2025**

## SKRIPSI BERJUDUL

### **Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Integrated Reporting (Studi Kasus pada Perusahaan Index LQ-45 yang Teraftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)**

Yang disusun dan dipersiapkan oleh :

Adelia Salsabilla  
2134031042

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 21 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk **DITERIMA**

#### DEWAN PENGUJI


Pembimbing I,

  
Dr. Dewi Rejeki, SE, Ak, M. Si, CA  
NIDN. 0310087103

Penguji I,

  
Dr. Imam Wibowo, SE, M.Si  
NUPTK. 5657736637130032

Pembimbing II,

  
Randy Kurnia Permana, SE, M.Ak  
NIDN. 0323089202

Penguji II,

  
Dr. Tasum, SE, M.Si  
NIDN. 0306067008

Jakarta, 21 Agustus 2025  
Universitas Krisnadwipayana  
Fakultas Ekonomi  
D e k a n,

  
Dr. Imam Wibowo, SE, M.Si  
NUPTK. 5657736637130032

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA

---

### **REKOMENDASI SIDANG SKRIPSI**

Bersama ini kami Pembimbing I dan Pembimbing II, menyatakan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Adelia Salsabilla  
NIM : 2134031042  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Integrated Reporting  
(Studi Kasus pada Perusahaan Index LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2020-2023)

Pembimbing I



Hj. Dewi Rejeki, SE., Ak., M.Si., CA  
NIDN. 0310087103

Pembimbing II



Randy Kurnia Permana, SE., M.Ak  
NIDN. 0323089202



**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA  
FAKULTAS EKONOMI**

TERAKREDITASI Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Departemen Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia  
Kampus UNKRIS Jatiwaringin Pondok Gede P.O Box 7774/Jat C.M Jakarta 13077  
Telp. (021) 8462229-8462230-8462231 Fax. (021) 8462461  
Home Page: <https://ekonomi-unkris.ac.id> Email: [fakultasekonomi@unkris.ac.id](mailto:fakultasekonomi@unkris.ac.id)

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Adelia Salsabilla  
No. DP/NIM : 2134031042  
Program Studi : Akuntansi  
Jurusan/Konsentrasi : Keuangan

**M E N Y A T A K A N**

Bahwa:

Judul Skripsi

"Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Integrated Reporting (Studi Kasus pada Perusahaan Index LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)"

Adalah **BENAR BEBAS DARI PLAGIAT** dengan tingkat *Plagiarism 16%*, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 28 - Juni - 2025  
Yang Membuat Pernyataan

Adelia Salsabilla

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA

---

**TANDA PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

Nama : Adelia Salsabilla  
NIM : 2134031042  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Integrated Reporting  
(Studi Kasus pada Perusahaan Index LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2020-2023)

Pembimbing I



Dr. Dewi Rejeki, SE., Ak., M.Si., CA  
NIDN. 0310087103

Pembimbing II



Randy Kurnia Permana, SE., M.Ak  
NIDN. 0323089202

Diketahui oleh :  
Dekan,



Dr. Imam Wibowo, SE., M.Si  
NIDK. 8943070023

## PERNYATAAN DATA SEKUNDER

Dengan ini, saya yang bertandatangan dibawah ini

:

Nama : Adelia Salsabilla

NIM : 2134031042

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Integrated Reporting*  
(Studi Kasus pada Perusahaan Index LQ-45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)

Telah melakukan penulisan skripsi dan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari data – data publik yaitu:

1. Laporan Tahunan tahun 2020 – 2023 yang terdaftar di Website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
2. Laporan Tahunan Perusahaan yang terdaftar pada Website masing – masing Perusahaan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 6 Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan,



(Adelia Salsabilla)

## ABTRAKSI

Nama	: Adelia Salsabilla
NIM	: 2134031042
Program Studi	: Akuntansi
Judul	: pengaruh <i>Good Corporate governance</i> terhadap <i>integrated reporting</i> (studi kasus pada Perusahaan index LQ-45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia Periode 2020-2023)
Tujuan Penelitian	: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh <i>Good Corpoate Governance</i> Terhadap <i>Integrated Reporting</i> Studi Kasus pada Perusahaan Index LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2023
Metode	: Penelitian ini dilakukan di perusahaan Index LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023. Metode penentuan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> sehingga sampel yang digunakan sebanyak 12 perusahaan. Teknis analisis data yang digunakan adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas, model regresi linier berganda dan uji hipotesis yang dilakukan dengan SPSS 27
Temuan	: Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh Kepemilikan Institusional dan kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh terhadap <i>Integrated Reporting</i> , sedangkan Komite Audit dan Komisaris Independen tidak diperoleh pengaruh terhadap <i>Integrated Reporting</i> secara parsial.

## **ABSTRACT**

- Name* : *Adelia Salsabilla*
- NIM* : *2134031042*
- Study Program* : *Accounting*
- Title* : *The influence Good Corporate governance against integrated reporting (case study on LQ-45 index companies listed on the Indonesia n stock exchange for the 2020-2023 period)*
- Research Purposes* : *This research was conducted to determine the Influence of Good Corporate Governance on Integrated Reporting Case Study on LQ-45 Index Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020 - 2023.*
- Method* : *This research was conducted in LQ-45 Index companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2023. The sampling method used purposive sampling method so that the sample used was 12 companies. The data analysis techniques used were descriptive statistics, classical assumption tests, normality tests, multicollinearity tests, autocorrelation tests, and heteroscedasticity tests, multiple linear regression models and hypothesis tests conducted with SPSS 27.*
- Findings* : *From the results of the research conducted, it was obtained that Institutional Ownership and Managerial Ownership partially affect the Integrated Reporting, while the Audit Committee and the Independent Commissioners have no influence on Integrated Reporting partially.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan Kepada Tuhan yang Maha Esa, karna atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, oleh karna itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Imam Wibowo, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana.
2. Dr. Diana Gustinya SE., M.Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana.
3. Dr. Dewi Rejeki, SE., Ak., M.Si., CA selaku dosen pembimbing pertama yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Randy Kurnia Permana, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing kedua yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teruntuk kedua Orang tua tercinta penulis yakni Bapak Supardi dan Ibu Marniatun, dua orang yang selalau mengusahakan anaknya menempuh Pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka sendiri hanya bisa menempuh Pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak penulis terimakasih atas segala tetes keringat dalam setiap langkah perjalanan dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu agar bisa mengenyam Pendidikan sampai ke Tingkat ini. Untuk Ibu saya,

terimakasih telah memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak demi meraih mimpi dimasa depan. Terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi penulis. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

6. Kepada kakak dan adik penulis, Amjad Renaldi S.Kom dan Muhammad Asyraf terimakasih atas dukungan serta bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk sahabat saya Anisya Dewi Khandari, Amelia Putri Herda, Cantika Zahra, Suci Rahmawati, dan Nourmazatul Kharisma, terimakasih telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk menjadi partner bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis.
8. Terimakasih untuk diri saya sendiri, apresiasi sebesar - besarnya karna sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih sudah berjuang yang terbaik, serta senantiasa menikmati semua prosesnya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Bekasi, 5 April 2025

Adelia salsabilla

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Penelitian .....	12
1.3 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	13
1.5.2 Manfaat Praktisi .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	15
2.1 Kajian Teori.....	15
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	15
2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder Theory</i> ).....	16
2.1.3 <i>Integrated Reporting</i> .....	17
2.1.4 <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	26
2.1.5 Komite Audit.....	39
2.1.6 Komisaris Independen.....	41
2.1.7 Kepemilikan Institusional .....	42
2.1.8 Kepemilikan Manajerial.....	43
2.2 Penelitian-Penelitian Yang Relevan .....	44
2.3 Kerangka Konseptual .....	48
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	49
2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Integrated Reporting</i> .....	49
2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Integrated Reporting</i> .....	50
2.4.3 Pengaruh kepemilikan Institusional Terhadap <i>Integrated Reporting</i> .....	51

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Integrated Reporting</i> .....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	54
3.2 Desain Penelitian.....	54
3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya.....	55
3.3.1 Variabel Independen (X) .....	55
3.3.2 Variabel Dependen (Y).....	57
3.3.3 Operasional Variabel Penelitian .....	59
3.4 Populasi Dan Sampel .....	62
3.4.1 Populasi.....	62
3.4.2 Sampel.....	62
3.5 Sumber Data dan Skala Data.....	64
3.6 Teknik Analisis Data .....	65
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif .....	65
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	66
3.6.3 Uji Regresi Linear Berganda.....	69
3.6.4 pengujian hipotesis.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	71
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	71
4.2 Profil Prusahaan .....	71
4.3 Hasil Penelitian .....	87
4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	88
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	91
4.6 Pengujian Hipotesis.....	102
4.7 Pembahasan.....	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
8.1 Kesimpulan .....	118
8.2 Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	121

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan .....	44
Tabel 3. 1 Operasional Variabel dan Skala Penelitian.....	59
Tabel 3. 2 Kriteria Pemilihan Sampel .....	63
Tabel 3. 3 Daftar Sampel Penelitian.....	64
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	88
Tabel 4. 2 Normalitas One – Sample Kolomogrov – Smirnov Test (Sebelum di Outlier).....	95
Tabel 4. 3 Normalitas One – Sample Kolomogrov – Smirnov Test (Setelah di Outlier).....	96
Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas .....	98
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi.....	100
Tabel 4. 6 Persamaan DW, DL, dan DU .....	101
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda.....	102
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Parsial (Uji T) .....	105
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Rata-Rata Pengungkapan IR .....	4
Gambar 4. 1 Grafik Histogram.....	92
Gambar 4. 2 Grafik Normal P-Plot .....	93
Gambar 4. 3 Grafik Scatterplot Dependent Variabel IR .....	99

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era bisnis modern, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam menciptakan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat. Perusahaan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kinerja keuangan semata, tetapi juga bagaimana mereka mengelola aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Salah satu bentuk pelaporan yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan, muncul pendekatan pelaporan baru yang lebih komprehensif, yaitu *Integrated Reporting (IR)*,

*Integrated reporting* dapat meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan. Pemerintah Indonesia telah menganjurkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaannya pada laporan tahunan. Persyaratan ini dimuat pada PP No.47/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Meskipun demikian, ketidakadaan standar khusus atas pengungkapannya membuat perbedaan pada tingkat pengungkapan perusahaan.

Peraturan OJK No. 51/POJK. 03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik adalah peraturan terbaru untuk pengungkapan informasi non - keuangan perusahaan. Namun, tidak ada aturan yang mengharuskan laporan dibuat secara terintegrasi.

IR bertujuan untuk memberikan gambaran holistik mengenai strategi, kinerja, tata kelola, serta dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari suatu perusahaan. *International Integrated Reporting Council (IIRC)* memperkenalkan konsep ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan agar lebih mencerminkan nilai jangka panjang. *Integrated reporting* secara komprehensif menunjukkan hubungan antara delapan elemen prinsip penerapan pelaporan yaitu: (1) *Strategic focus and future orientation*, (2) *Connectivity of information*, (3) *Stakeholder relationship*, (4) *Materiality*, (5) *Risk management practice*, (6) *Consistency*, (7) *Reliability and completeness*, (8) *Consistency and comparability and assurance*. (IIRC, 2013). Selain menggunakan IIRC ada juga elemen IR dengan menggunakan NKONKI (2011) yaitu, (1) *Ethica Leadership And Corporate Citizenship*, (2) *Board Of Directors*, (3) *Audit Committees*, (4) *The Governance Of Risk*, (5) *The Governance Of Information Technology*, (6) *Compliance With Laws, Codes, Rules, And Standards*, (7) *Internal Audit*, (8) *Governing Stakeholdership*, (9) *IR Disclosure*.

Konsep IR yang diperkenalkan oleh *International Integrated Reporting Council (IIRC)* telah diadopsi oleh berbagai perusahaan di dunia, terutama

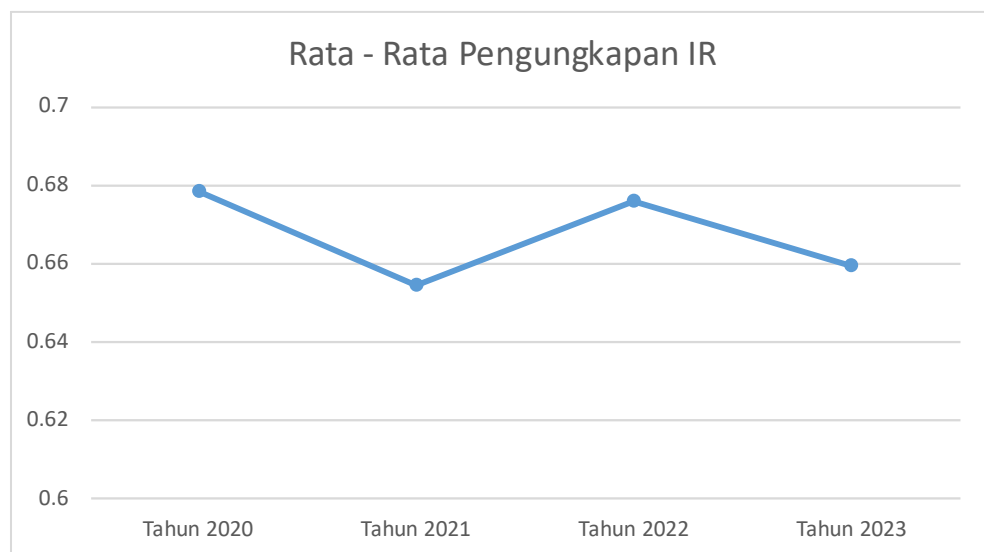
yang memiliki kepentingan dengan investor institusional dan pasar modal global. Beberapa negara bahkan telah menerapkan IR sebagai standar wajib bagi perusahaan publik, seperti Afrika Selatan yang mewajibkan IR dalam laporan tahunan sejak 2010. Di negara lain, seperti Inggris dan Australia, IR telah menjadi praktik umum di kalangan perusahaan besar untuk meningkatkan transparansi dan daya saing perusahaan di pasar global.

Meskipun IR memiliki banyak manfaat, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia konsep IR mulai diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir dan semakin mendapat perhatian. Meskipun belum diwajibkan secara penuh oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bursa Efek Indonesia (BEI), beberapa perusahaan telah mengadopsi IR secara sukarela. Tren ini terutama terlihat pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ-45, yaitu kelompok 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Sebagai perusahaan yang menjadi perhatian investor, penerapan IR diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta menarik minat investor yang mengutamakan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah perusahaan yang mengadopsi IR masih terbatas dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar. Laporan Keberlanjutan BEI tahun 2025 menunjukkan bahwa terdapat 951 emiten yang terdaftar di BEI, hanya sebagian kecil yang secara eksplisit menerapkan IR dalam laporan tahunan mereka. Hal ini menunjukkan

adanya kesenjangan dalam implementasi IR, meskipun manfaatnya telah banyak didukung oleh penelitian dan praktik bisnis global.

**Gambar 1. 1**  
**Grafik Rata-Rata Pengungkapan IR**



Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 1.1 yang berjudul Grafik Rata-rata Pengungkapan *Integrated Reporting (IR)* dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 selama periode 2020 hingga 2023. Secara umum, terdapat fluktuasi dalam tingkat pengungkapan IR selama empat tahun tersebut.

Pada tahun 2020, rata-rata pengungkapan IR berada di sekitar 0.68. yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan LQ45 telah mulai mengadopsi pelaporan terintegrasi yang mencakup informasi keuangan maupun non-keuangan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pada

masa awal, perusahaan mulai memahami pentingnya pelaporan yang tidak hanya fokus pada kinerja keuangan tetapi juga mencakup keberlanjutan dan strategi jangka panjang (*International Integrated Reporting Council [IIRC], 2021*).

Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan rata-rata pengungkapan IR menjadi sekitar 0,65. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perusahaan lebih fokus pada aspek kelangsungan usaha dan stabilitas operasional. Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung memprioritaskan pelaporan finansial dan mengurangi fokus pada informasi keberlanjutan atau non-keuangan (KPMG, 2020). Selain itu, ketidakpastian ekonomi juga turut memengaruhi kebijakan perusahaan dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh kepada publik.

Pada tahun 2022, terlihat adanya peningkatan kembali pada rata-rata pengungkapan IR, yaitu sebesar 0,68. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai menyesuaikan diri dengan situasi pasca pandemi dan kembali memperhatikan pelaporan yang lebih komprehensif. Peningkatan ini juga mencerminkan adanya penguatan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), serta meningkatnya kesadaran bahwa pelaporan terintegrasi merupakan alat komunikasi penting kepada investor dan pemangku kepentingan.

Namun demikian, tren peningkatan tersebut tidak berlanjut pada tahun 2023. Grafik menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan IR kembali mengalami penurunan menjadi sekitar 0,66. Meskipun penurunan ini tidak signifikan, kondisi ini menunjukkan bahwa pengungkapan IR di perusahaan LQ45 masih belum stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi IR masih menghadapi tantangan, baik dari sisi internal seperti kurangnya sumber daya dan komitmen manajemen, maupun dari sisi eksternal seperti belum adanya regulasi yang mengharuskan penerapan IR di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023).

Secara keseluruhan, meskipun pengungkapan IR pada perusahaan LQ45 menunjukkan rata-rata yang cukup baik, tren yang fluktuatif menandakan perlunya peningkatan komitmen dan dukungan regulasi untuk memperkuat penerapannya. Dorongan dari regulator, asosiasi profesi, maupun investor sangat diperlukan agar pelaporan terintegrasi dapat diterapkan secara lebih luas, konsisten, dan berdampak nyata terhadap transparansi dan keberlanjutan perusahaan.

Salah satu indikator yang memengaruhi *integrated reporting* adalah *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah seperangkat aturan dan struktur organisasi dasar untuk operasi bisnis yang dipahami sebagai bentuk pemenuhan kepentingan yang terkadang berbeda dari para pemangku kepentingan. Praktik pengungkapan pelaporan dipengaruhi tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan

akuntabilitas dan berperan dalam memprioritaskan kepentingan dari pemegang saham serta memastikan keselarasan kepentingan dari tiap pihak.

*Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses sebuah perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu setiap perusahaan harus menerapkan konsep *corporate governance* pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan, yang memuat prosedur atau mekanisme yang dapat meyakinkan prinsipal terhadap kinerja perusahaan. *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur bisnis perusahaan yang dijalankan oleh manajemen dilakukannya untuk meningkatkan kemakmuran serta akuntabilitas perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* demi kesinambungan usaha. Mekanisme *corporate governance* juga dapat memberikan rasa percaya kepada principal bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan perusahaan yang dibuat oleh manajemen adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme GCG dapat diukur dengan indikator-indikator berikut: Kepemilikan manajerial, Komisaris independen, Dewan direksi, Kepemilikan institusional, dan Komite audit (Rizkiyatil Holishah, 2021)

komite audit merupakan komponen penting dalam tata kelola perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Ikatan Komite Audit Indonesia memaparkan bahwasannya komite audit merupakan salah satu unsur dalam kerangka *GCG (Good Corporate Governance)* yang

keberadaannya diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan.

Komite audit memiliki hubungan dengan hampir semua pemangku kepentingan organisasi (misalnya, dewan direksi, auditor internal, auditor eksternal, dan sampai batas tertentu, pemegang saham dan pengguna laporan keuangan) Maka dari itu dengan dibentuknya komite audit dalam suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi para pemegang saham, dewan komisaris, manajemen perusahaan dan *external auditor*. (Haniffah, 2021)

Dalam jajaran komisaris, terdapat 2 jenis yaitu komisaris dan komisaris independent. Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor 19 tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Rapat Dewan Komisaris dan Direksi BUMN, komisaris merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Mereka adalah individu yang dipilih oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan biasanya memiliki latar belakang dan pengalaman yang mendalam di bidang industri yang relevan dengan BUMN tersebut.

Dalam pasal 33 ayat 3 peraturan itu dijelaskan, tugas utama Komisaris mencakup pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Sedangkan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota dewan komisaris lainnya, maupun direksi. Mereka dipilih dari pihak luar untuk menjamin independensi pengawasan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah adil dan menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas dan publik.

Hal ini tertera dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan tertentu seperti tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi, dan tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Dalam pasal 120 undang-undang itu dijelaskan, komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi proses audit dan pengendalian internal perusahaan, serta melindungi kepentingan publik dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan.

<https://www.tempo.co/ekonomi/perbedaan-komisaris-dan-komisaris-independen-di-perusahaan-bumn-48182> 18 Juni 2024)

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi dan bentuk institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat dilihat dari presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengawasan eksternal terhadap perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan menghindari perilaku yang merugikan. Diyakini bahwa pengawasan dari pihak institusional dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. (Uyun, Ratno Agriyanto, 2020)

Ketika manajemen memiliki surat berharga di dalam perusahaan dan berpartisipasi dalam membuat keputusan, hal ini disebut kepemilikan manajerial. Artinya, manajemen manajerial adalah bagian dari manajemen organisasi selain memiliki saham di perusahaan. (Wahyudin, 2020) mengartikan kepemilikan manajerial yaitu bagian kepemilikan surat berharga suatu perusahaan yang dipegang manajemen. kepemilikan manajerial diukur dengan total surat berharga dimiliki oleh manajemen dibagi dengan total surat berharga yang beredar. (Akmal and Lestari, 2023)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Integrated Reporting*. (Wijaya & Agustina, 2021 ) & (Haniffah, 2021). Namun peneliian lain seperti (Pramaisella and Lestari, 2023) dan (Moeljadi, Angelina and Pangestu, 2022) menyatakan bahwa Komite audit tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Beberapa studi menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Integrated Reporting*. (Wahyudin, 2020) dan (Permana, Aruddy and Jahroh, 2023). Sebaliknya, penelitian lain seperti (Sugihani and Wijayanti, 2022) dan (Moeljadi, Angelina and Pangestu, 2022) menyatakan bahwa dewan komisaris independent tidak memiliki pengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Dari hasil penelitian (Wijaya and Agustina, 2021) dan (Uyun, Ratno Agriyanto, 2020) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Sedangkan menurut (Moeljadi, Angelina and Pangestu, 2022) dan (Permana, Aruddy and Jahroh, 2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Dari hasil penelitian (Permana, Aruddy and Jahroh, 2023) kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Integrated Reporting* . sedangkan menurut (Akmal and Lestari, 2023) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kesenjangan terdahulu (*research gap*) yang menganalisa pengaruh GCG terhadap *Integrated Reporting*, Sebagian besar menemukan adanya hasil yang bertolak belakang atau tidak konsisten. Maka penelitian ini dilakukan riset lanjutan mengenai komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Sehingga judul dalam penelitian ini “pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting*”.

## 1.2 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas serta untuk mempermudah masalah yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Yaitu, Periode penelitian yang akan di teliti tahun 2020-2023. Variabel *Good Corporate governance* yang di proksikan dalam penelitian ini adalah Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *Integrated Reporting*?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *Integrated Reporting*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Integrated Reporting*?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Integrated Reporting*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *Integrated Reporting*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *Integrated Reporting*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Integrated Reporting*.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Integrated Reporting*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Peneliti
  - a. Meningkatkan kemampuan serta pemahaman peneliti terkait komite audit, komisaris independent, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.
  - b. Menambah pengetahuan peneliti dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pengungkapan *integrated reporting*.
2. Bagi Akademis
  - a. Menambah literatur di Universitas Krisnadwipayana yang dapat dipakai untuk membuat suatu karya tulis ataupun kegiatan ilmiah lainnya.
  - b. Memberi inspirasi dan sumber pengetahuan serta pemahaman pada mahasiswa/i Universitas Krisnadwipayana dalam penelitian selanjutnya.

### 1.5.2 Manfaat Praktisi

- a. Bagi perusahaan, diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas secara independen yang dilakukan oleh komite audit agar setiap korporasi dapat menjalankan model bisnisnya dengan baik sehingga dapat mewujudkan kinerja yang diharapkan, dapat menghasilkan *integrated reporting* yang berkualitas, serta dapat memberikan referensi bagi para manajer dalam upaya memaksimalkan pengungkapan *integrated reporting*.
- b. Bagi investor, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor dan *stakeholders* lain mengenai manfaat pengungkapan *integrated reporting*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan hubungan di mana adanya perjanjian kontrak antara satu pihak yang disebut dengan *principle* dengan satu pihak lain yang disebut dengan agent dimana agent harus memberikan jasanya kepada pihak *principle*. Teori ini menyebutkan bahwa *principle* merupakan pihak yang memberikan mandat dalam bentuk kepercayaan kepada pihak lain yang dimana dalam hal ini pihak agent merupakan pihak yang memberikan jasanya kepada pihak *principle* untuk melaksanakan kewenangan yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kewenangan yang diberikan oleh *principle* kepada agent dalam hal ini adalah pendelegasian pengelolaan perusahaan dan pengambilan Keputusan sesuai dengan kepentingan pihak *principle*.

Dalam hubungan kontraktalnya, *principle* (pemilik) mendelegasikan pengelolaan dan pengambilan keputusan sepenuhnya kepada manajer (agen) yang mana dapat terjadi *agency conflict* (konflik kepentingan) antara agent dan *principle* maupun antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas, namun *agency conflict* tersebut dapat diminimalisir dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Pihak-pihak dalam komponen GCG dapat terdiri dari dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite

audit serta peran dari investor dalam hal ini investor institusi yang tergambar dari besarnya kepemilikan institusional.

Teori ini juga menjelaskan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka memunculkan biaya keagenan yang semakin besar pula. Contoh dari biaya keagenan adalah biaya audit yang dikeluarkan untuk mengawasi aktivitas manajerial. Cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan adalah dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas yaitu *information intermediaries*. *Information intermediaries* merupakan salah satu solusi untuk mengurangi konflik keagenan melalui pengungkapan perusahaan. Pengungkapan keuangan dan non keuangan yang terintegrasi dapat menarik pemegang saham baru, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi dan untuk meningkatkan nilai perusahaan, yaitu dengan melalui pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*) (Wijaya and Agustina, 2021).

### **2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Teori pemangku kepentingan, sebagaimana dikemukakan oleh Freeman (1984), mendefinisikan "pemangku kepentingan" sebagai "pihak yang berkepentingan" (individu atau kelompok) yang mungkin terpengaruh dan dipengaruhi oleh tindakan bisnis terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Keberlangsungan usaha dan pencapaian tujuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh pemegang saham atau *shareholders* namun dipengaruhi juga oleh pihak-pihak berkepentingan atau *stakeholders*. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Freeman pada tahun 1984 yang mengatakan

bahwa organisasi bisnis harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan dari *stakeholders* lain dalam suatu pengambilan keputusan strategis.

Perusahaan perlu menyampaikan dan mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan kepada *stakeholder*, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* dalam membuat suatu keputusan. Jika sebuah perusahaan benar-benar peduli dengan pemangku kepentingannya, maka akan melampaui kewajiban untuk mengungkapkan informasi penting tentang operasinya, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut berguna untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya dan kebutuhan informasi yang diinginkan *stakeholder* (Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliasari, 2023)

### **2.1.3 *Integrated Reporting***

#### **2.1.3.1 Definisi *Integrated reporting***

*Integrated Reporting* adalah suatu proses yang menghasilkan komunikasi yang ringkas, tertata, dan terstruktur mengenai bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek suatu organisasi, dalam konteks lingkungan eksternal, mengarah pada penciptaan, preservasi, atau erosi nilai dalam jangka pendek, menengah, dan Panjang ((IAPI), 2021). Definisi ini mengacu pada kerangka kerja internasional yang dikeluarkan oleh IIRC (*International Integrated Reporting Council*) dan diadopsi oleh IAPI dalam berbagai publikasi dan pedoman praktik profesional di Indonesia.

Sedangkan definisi *Integrated Reporting (IR)* dalam *IR Framework* tahun 2013 menurut (*International Integrated Reporting Council., 2013*) adalah komunikasi yang ringkas tentang bagaimana strategi organisasi, *governance*, kinerja dan prospek, dalam konteks lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan nilai jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jadi selain berisi tentang informasi keuangan, *Integrated Reporting* juga berisi informasi lainnya yang relevan dengan organisasi (Rejeki and Ahmar, 2022). *Integrated Reporting* merupakan mekanisme dalam mengkomunikasikan mengenai strategi, tata kelola, kinerja dan prospek yang berkaitan satu dengan lainnya dalam suatu laporan tunggal melalui laporan tahunan. Pentingnya implementasi *integrated reporting* dalam sistem pelaporan entitas perusahaan dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya terlihat dari pengungkapan prospek entitas perusahaan. Informasi yang tersaji dalam *integrated reporting* merupakan informasi yang mengungkapkan informasi yang berorientasi ke depan (prospektif) dengan mengacu pada rencana saat ini dan rencana di masa depan sehingga *integrated reporting* dapat memberikan informasi mengenai prospek masa depan Perusahaan (Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliasari, 2023).

Terdapat empat kerangka kerja yang muncul untuk memenuhi kebutuhan informasi perusahaan, yakni *balanced scorecard*, *triple bottom line*, *Sustainability Report*, dan *Integrated Reporting*. Ke empat laporan tersebut menyajikan informasi tentang aktivitas perusahaan serta pencapaian kinerja.

Kerangka *Integrated Reporting* dibuat dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai strategi, tata kelola, kinerja dan potensi perusahaan secara bersama-sama yang menggambarkan sisi komersial, sosial, dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi. Laporan tersebut mempresentasikan secara singkat dan jelas tentang bagaimana perusahaan bisa bernilai dimasa sekarang dan yang akan datang. *Integrated Reporting* menggabungkan secara komprehensif elemen elemen informasi dan menunjukkan hubungan diantara elemen tersebut dalam satu dokumen. Menjelaskan bagaimana elemen tersebut dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menciptakan dan mempertahankan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang (IIRC, 2013).

Pengungkapan penerapan *Good Corporate Governance* dalam *Integrated Reporting* akan meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi diperusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

### **2.1.3.2 Tujuan *Integrated reporting***

IIRC (2013) menjelaskan beberapa tujuan dibentuknya *Integrated Reporting* yaitu:

- 1) Menyediakan informasi bagi penyedia modal keuangan untuk memungkinkan alokasi modal yang lebih efisien dan produktif.
- 2) Mempromosikan pendekatan yang lebih terpadu dan efisien untuk pelaporan perusahaan yang mengacu pada kerangka yang berbeda dan

mengkomunikasikan informasi yang material yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dari waktu ke waktu.

- 3) Meningkatkan akuntabilitas mengenai modal perusahaan yaitu *financial capital, manufactured capital, human capital, sosial and relationship capital*, dan *natural capital* serta menjelaskan bahwa modal-modal tersebut saling berhubungan dengan faktor-faktor organisasi lainnya.
- 4) Mendukung *integrated thinking* dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang berfokus pada penciptaan nilai perusahaan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

#### **2.1.3.3 Peran dan Fungsi *Integrated reporting***

*Integrated reporting* dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas, pengelolaan, dan kepercayaan serta memanfaatkan arus informasi dan transparansi bisnis yang dibawa oleh teknologi ke dunia modern. Memberikan informasi yang dibutuhkan investor untuk membuat keputusan keputusan mengenai alokasi sumber daya yang lebih baik, termasuk pengurangan biaya atau peningkatan manajemen risiko Perusahaan, identifikasi peluang yang lebih baik, komitmen yang lebih besar kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan saat ini dan masa depan, sehingga dapat memfasilitasi daya tarik keterampilan dan retensi. peningkatan citra public, biaya modal yang lebih rendah, dan akses yang lebih baik (Pratiwi *et al.*, 2023). IR memiliki tiga kelas manfaat yaitu :

- 1) Manfaat internal, termasuk keputusan alokasi sumber daya internal yang lebih baik, keterlibatan yang lebih besar dengan *shareholders* dan *stakeholders*, dan risiko reputasi yang lebih rendah.
- 2) Manfaat pasar eksternal, termasuk terpenuhinya kebutuhan investor yang menginginkan informasi ESG dan memastikan bahwa penyedia data melaporkan informasi non keuangan secara akurat
- 3) Pengelolaan risiko regulasi, termasuk persiapan akan adanya perubahan regulasi secara global dan memenuhi persyaratan pasar modal.

#### **2.1.3.4 Prinsip *Integrated reporting***

IIRC, (2013) menyatakan bahwa kerangka kerja *Integrated Reporting* memiliki pendekatan dengan basis prinsip. Pendekatan prinsi digunakan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diakui secara luas dalam keadaan masing-masing suatu organiasi yang berbeda sehingga dapat memungkinkan tingkat komparabilitas yang memadai bagi seluruh organisasi dalam memenuhi keutuhan akan informasi yang relevan. kerangka kerja *Integrated Reporting* diuraikan bahwa terdapat tujuh prinsip panduan yang mendukung penyusunan *Integrated Reporting*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

##### *1) Strategic Focus Dan Future Orientation*

Prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan harus berisi wawasan mengenai strategi perusahaan dan menggambarkan bagaimana

kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, serta menggambarkan penggunaan dan dampaknya terhadap modal.

2) *Connectivity of Information*

Prinsip ini mengatur bahwa *Integrated Reporting* harus memberikan gambaran secara holistik mengenai kombinasi, keterkaitan, dan ketergantungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai dari waktu ke waktu.

3) *Stakeholder Relationship*

Prinsip ini mengharuskan *Integrated Reporting* untuk memberikan wawasan mengenai sifat dan kualitas hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan utamanya, termasuk bagaimana dan sejauh mana perusahaan memahami, mempertimbangkan dan menanggapi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* lainnya.

4) *Materiality*

Dalam prinsip ini diatur bahwa *Integrated Reporting* harus mengungkapkan informasi mengenai semua hal yang secara substantif dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai.

5) *Conciseness*

Prinsip ini mewajibkan *Integrated Reporting* harus disajikan secara ringkas.

6) *Reliability and Completeness*

Prinsip ini mengatur bahwa *Integrated Reporting* harus mencakup semua hal yang material baik yang positif maupun negatif dan diungkapkan dengan cara yang benar dan tanpa kesalahan material.

7) *Consistency and Comparability*

Prinsip terakhir mengatur bahwa semua informasi yang terdapat dalam *Integrated Reporting* harus disajikan atas dasar yang konsisten dari waktu ke waktu dan dengan cara yang memungkinkan untuk adanya perbandingan dengan perusahaan lainnya.

### 2.1.3.5 Elemen-elemen *Integrated Reporting*

NKONKI (2011) menyatakan bahwa terdapat sembilan elemen, elemen tersebut adalah sebagai berikut :

1. Etika Kepemimpinan (*Ethical Leadership*) dan *Corporate Citizen*

Elemen ini berkaitan dengan pengungkapan nilai-nilai, visi, misi, dan kode etik perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus mengungkapkan informasi apa pun tentang kinerja etika perusahaan, serta proses untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja (NKONKI, 2011).

2. Dewan Dan Direktur (*Board and Directors*)

Elemen ini mengungkapkan proses dan orang yang bertanggung jawab atas penilaian independensi direktur, faktor apa yang digunakan dalam mengevaluasi independensi direktur dan apakah ketua melakukan penilaian (NKONKI, 2011). Elemen penting dalam pengungkapan tata

kelola yang baik adalah seputar dewan direksi. Penting untuk menunjukkan komposisi dewan dan komite dewan, independensi direktur, bagaimana kinerja mereka diukur dan remunerasi mereka, serta kebijakan remunerasi dan pengungkapan penuh elemen remunerasi (NKONKI, 2011).

3. Komite Audit (*Audit Committees*)

Komite Audit Elemen <IR> ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa komite audit telah menerima tanggung jawabnya. Dengan demikian, informasi yang diberikan menjelaskan tentang bagaimana komite audit telah merekomendasikan laporan terpadu untuk disetujui oleh dewan dan apakah komite audit telah meninjau bagian laporan keuangan dalam <IR> (NKONKI,2011)

4. Tata Kelola Risiko (*The Governance of Risk*)

Tata Kelola Risiko. Bagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan dari komite risiko disertakan dalam <IR>. Perusahaan harus mengungkapkan risiko dalam berbagai kategori termasuk tata kelola dan risiko TI dan semua aspeknya (kebijakan manajemen risiko, struktur tata kelola risiko, metodologi manajemen risiko, pengendalian internal, risiko strategis, dan garis pertahanan (NKONKI, 2011).

5. Tata Kelola Teknologi Informasi (*The Governance of Information Technology*)

Tata Kelola Teknologi Informasi, Elemen ini dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana perusahaan mengatur teknologi informasinya

dalam menyediakan informasi yang lebih relevan dan terintegrasi bagi pengguna.

6. Kepatuhan terhadap Hukum, Kode, Aturan dan Standar (*Compliance with Laws, Codes, Rules and Standards*).

Kepatuhan terhadap Hukum, Kode, Aturan, dan Standar. Dimensi ini mengungkapkan kerangka kepatuhan yang digunakan untuk memantau dan mengomunikasikan kepatuhan terhadap semua aspek ini dan bagaimana dewan direksi telah melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan kerangka ini dan proses terkait (NKONKI, 2011).

7. Audit Internal (*Internal Audit*)

Audit Internal. Meskipun bagian ini membahas audit internal, rekomendasi pengungkapan terbatas pada pengungkapan efektivitas sistem pengendalian internal dalam laporan terpadu (NKONKI, 2011). Dalam kasus di mana perusahaan tidak memiliki fungsi audit internal, penjelasan tentang bagaimana jaminan yang memadai atas tata kelola yang efektif, manajemen risiko, dan lingkungan pengendalian internal telah dipertahankan (NKONKI, 2011).

8. Mempertahankan Hubungan *Stakeholders* (*Governing Stakeholders Relationship*)

Mengatur Hubungan Pemangku Kepentingan. Rekomendasi dalam Kode King III dari <IR> adalah bahwa dewan harus mengungkapkan dalam laporan terpadunya sifat hubungannya dengan para pemangku kepentingan dan hasil dari hubungan tersebut (NKONKI, 2011).

## 9. Pengungkapan *Integrated Reporting (Integrated Reporting Disclosure)*

Pengungkapan pelaporan terpadu. Bab 9 dari kode King III dari <IR> meminta agar laporan keuangan tahunan dimasukkan dalam laporan terpadu. Oleh karena itu, dewan direksi harus menyertakan komentar tentang hasil keuangan perusahaan, dewan direksi harus mengungkapkan apakah perusahaan tersebut merupakan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan atau laporan serupa sebagai bagian dari laporan terpadu, jaminan informasi keberlanjutan, laporan terpadu yang diringkas (termasuk informasi keuangan utama), dan jaminan laporan terpadu yang diringkas (NKONKI, 2011).(Chariri, 2019)

### **2.1.4 Good Corporate Governance (GCG)**

#### **2.1.4.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

Menurut *Forum for corporate governance in Indonesian (FCGI)*, tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen saham, manajemen industri, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya, atau sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perusahaan. Secara keseluruhan, *Good Corporate Governance (GCG)* dapat memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan dalam industri dilindungi.

Surat Pernyataan Departemen Dalam Negeri/Direktur Badan Pengembangan Penanaman Modal BUMN No.23/ Meter PM/ BUMN/2000 Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Industri Dalam Rangka Pengembangan Perusahaan (PERSERO), *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan prinsip yang wajar untuk diterapkan dalam manajemen industri, Hanya untuk melindungi kepentingan perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan (Diah, 2007).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance (GCG)* di Indonesia, GCG adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan aktivitas perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Perbedaan kepentingan dan tujuan antara agen dan prinsipal dapat membawa agen salah mewakili informasi kepada prinsipal. Konflik antara agen dan prinsipal di dalam perusahaan terkadang tidak dapat dihindari sehingga dapat menimbulkan *agency problem*. Adanya mekanisme corporate governance yang baik diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan, salah satu caranya dengan dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas, seperti halnya *integrated reporting* (Sugihani and Wijayanti, 2022).

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* itu adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. Idealnya pihak internal yang mungkin terdiri dari direktur, para pekerja dan manajemen akan menerima gaji dan imbalan lainnya dalam jumlah yang wajar. sementara para pemegang saham seharusnya menerima pengembalian (*return*) atas modal yang mereka investasikan. Kreditur akan memperoleh pelunasan atas pinjaman yang mereka berikan beserta bunganya, begitu juga halnya dengan pelanggan, mereka akan dapat memperoleh barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan dengan harga yang wajar dan sebanding dengan uang yang mereka korbakan saat membeli, pemasok akan menerima pembayaran atas barang atau jasa yang mereka serahkan kepada perusahaan dan bahkan masyarakat sekitarnya pun diharapkan akan memperoleh kontribusi social atau bentuk-bentuk manfaat yang lainnya. Tata hubungan yang sedemikian itulah yang ingin diwujudkan oleh *corporate governance*. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan *corporate governance* adalah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang

dan sekaligus menciptakan *value added* bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Dwiridotjahjono, 2010).

#### **2.1.4.2 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance (GCG)**

Penerapan *good corporate governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *good corporate governance* (Dwiridotjahjono, 2010) dapat disebut antara lain:

1. Dengan penerapan *good corporate governance* perusahaan dapat meminimalkan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya Perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.
2. Perusahaan dapat meminimalkan *cost of capital*, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.

3. Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.
4. *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.
5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.
6. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila Perusahaan yang bersangkutan berbentuk

perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.

7. Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
8. Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik.
9. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *good corporate governance* sebagaimana disebutkan di atas, wajar kiranya semua *stakeholders* terutama para pelaku usaha di Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional. Meskipun telah banyak upaya ke arah itu yang dilakukan, baik oleh pihak pemerintah sendiri, organisasi-organisasi non-pemerintah (*Non-*

*Governmental Organizations-NGOs*) serta para pelaku usaha, namun amat disayangkan hingga saat ini penerapan konsep *corporate governance* itu masih hanya sebatas mengikuti trend yang berkembang dan guna menunjukkan kepatuhan (*conformance*) atas ketentuan yang ditetapkan oleh berbagai institusi pemberi dana dan pemerintah. Seharusnya para pelaku usaha memandang dan menyadari bahwa *good corporate governance* merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

#### **2.1.4.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

Perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada semua aspek perusahaan dan setiap perusahaan. Prinsip ini diperlukan untuk pengembangan perusahaan yang berkelanjutan. Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar bisnis dapat berfungsi dengan baik. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) memiliki 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain:

1. **Transparansi Bisnis** perlu menyampaikan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan untuk memudahkan mereka memahami dan mengakses informasi jika mereka ingin menjaga objektivitas dalam pelaksanaan operasi bisnis. Selain hal-hal yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan,

perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang berpotensi berdampak besar bagi pemegang saham, kreditur, dan pihak berkepentingan lainnya.

2. Tanggungjawab Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara tepat, terukur dan untuk kepentingan terbaik perusahaan, dengan tetap memperhatikan atau menghormati kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Kewajiban Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan memenuhi tanggung jawab mereka kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan proses bisnis mereka dalam jangka panjang.
4. Mandiri Dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus dijalankan secara independen, yang berarti bahwa setiap perusahaan dalam perusahaan tidak dapat berpihak kepada siapa pun atau saling mendominasi.
5. Keadilan Dalam menjalankan bisnis, perusahaan juga harus menghormati prinsip keadilan dan kesetaraan serta memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *good corporate governance* dan dapat diterapkan secara luwes (*fleksibel*) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara. Prinsip-

prinsip ini diharapkan menjadi *guidance* atau pedoman bagi para regulator (pemerintah) dan pelaku usaha dalam mengelaborasi *best practice good corporate governance* bagi peningkatan nilai dan *sustainability* perusahaan. Prinsip-prinsip dimaksud terdiri dari : 1) *Fairness*, 2) *Transparency*, 3) *Accountability*, dan 4) *Responsibility*.

1. *Fairness* (Kewajaran/Keadilan).

Prinsip 'Kewajaran atau Keadilan' ini merupakan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip *fairness* ini juga dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membedakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap organisasi atau perusahaan terkait.

Prinsip *fairness* ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, komite, termasuk sistem

remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan *equal job opportunity*.

2. *Transparency* (Transparansi).

Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Oleh sebab itu konsep *good corporate governance* harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practice* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan *Information Technology (IT)* dan *Management Information System (MIS)* untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan

komisaris dan direksi; mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas.

### 3. *Accountability* (Akuntabilitas).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. OECD menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan dengan tersedianya sistem yang mengendalikan hubungan antara organorgan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban mereka masing-masing. *Corporate governance* harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas ini.

#### 4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).

OECD menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.

Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Selain itu juga harus diingat bahwa ketentuan yang dibuat tentu antara lain bertujuan agar kepentingan pihak tertentu terutama masyarakat tidak dirugikan. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sanksi moral dari masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/MMBU/ 2002 bahwa di samping keempat prinsip di atas, masih ada satu prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip Kemandirian (*Independence*). Prinsip ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip-prinsip ini kemudian dijabarkan ke dalam lima aspek utama yang terdiri dari: 1) Hak-hak pemegang saham; 2) Perlakuan yang merata (sama) terhadap para pemegang saham; 3) Peranan pemegang saham yang harus diakui; 4) Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu; dan 5) Tanggungjawab dewan.

Secara keseluruhan terdapat berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang terdiri dari pemegang saham, investor, karyawan, dan manajer, pemasok dan rekanan bisnisnya, masyarakat setempat, pemerintah, institusi bisnis, media, akademisi, dan pesaingnya. Masing-masing pihak ini tentu memainkan peran-peran tertentu dalam penerapan *corporate governance*. Dalam hal ini perusahaan harus mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak (*stakeholder*) tersebut. Dengan *two tiers system* yang dianut oleh sistem korporasi di Indonesia, maka peranan para pemegang saham akan dilaksanakan oleh dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengendalian.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001), indikator Good Corporate Governance dapat dilihat melalui mekanisme kepemilikan saham (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial), keberadaan komisaris independen, serta komite audit sebagai fungsi pengawasan. Hal ini sejalan dengan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), yang menekankan peran dewan komisaris dan komite audit dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, OECD (2015) juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan seperti komite audit dan komisaris independen untuk memperkuat keterbukaan informasi. Dengan demikian, indikator GCG tersebut relevan untuk digunakan dalam menilai keterkaitan antara tata kelola perusahaan dengan kualitas pengungkapan Integrated Reporting.

#### **2.1.5 Komite Audit**

Menurut (Haniffah, 2021) komite audit adalah perwakilan dari dewan komisaris yang ditugaskan untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelola perusahaan termasuk mengawasi pelaporan keuangan yang disusun oleh manajemen, pengendalian internal, auditor internal dan eksternal perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan termasuk kegiatan manajemen risiko perusahaan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 1, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab

kepada dewan komisaris membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Pembentukan komite audit dilakukan oleh entitas perusahaan agar perusahaan dapat melakukan peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga kinerja manajemen menjadi efektif dan efisien serta dapat membantu meningkatkan dalam pengungkapan informasi secara komprehensif dan transparan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau *stakeholder*.

Maka dari itu entitas perusahaan dapat mendorong publikasi *integrated reporting* sehingga dapat mewujudkan dan menumbuhkan nilai Perusahaan (Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliasari, 2023). Keputusan Bapemam Kep-29/PM/2004 bahwa komite audit harus memiliki setidaknya satu komisaris independen yang merupakan ketua komite audit dan setidaknya dua anggota lainnya dari luar emiten atau perusahaan publik. Ukuran komite audit yang ideal adalah 3-4 orang (Bangun, 2022).

*National Governance Policy Council (2006)*, mandat komite audit adalah membantu komite dalam memastikan bahwa:

1. Laporan tahunan disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan terlaksana dengan baik.

3. Melakukan audit internal dan eksternal sesuai dengan standar auditing yang berlaku
4. Tindak lanjut manajemen untuk mengimplementasikan temuan audit.

#### **2.1.6 Komisaris Independen**

Menurut (Sugihani and Wijayanti, 2022) Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan secara khusus bukan merupakan pegawai perusahaan tersebut tetapi memiliki urusan langsung dengan organisasi internal perusahaan. Anggota komisaris independen bersifat netral atau tidak memiliki hubungan bisnis dan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan komisaris lainnya.

Menurut Peraturan Bapepam No. Kep 29/PM/2004, dikatakan sebagai "komisaris independen", seorang komisaris harus tidak terafiliasi dengan perusahaan, komisarisnya, dewan direksinya, atau pemegang saham utamanya; selain itu juga tidak dapat memegang saham apa pun di perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak dapat terlibat dalam operasi perusahaan dengan cara apa pun. Sekurang-kurangnya 30 persen dari dewan komisaris perusahaan harus terdiri dari komisaris independen, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK Nomor 57/PJOK 04/2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proporsi komisaris independen yang lebih besar daripada struktur dewan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebab kehadiran komisaris

independen dapat memperkuat ruang lingkup dan efektivitas pengawasan dan pemantauan, sehingga mendorong korporasi melakukan pengungkapan pelaporan secara terbuka dan terintegrasi (Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliasari, 2023).

### **2.1.7 Kepemilikan Institusional**

Faktor yang dapat mempengaruhi elemen *Integrated Reporting* yaitu kepemilikan institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Permata, JMV and Edy, 2020).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi dan bentuk institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat dilihat dari presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain. Semakin tinggi

kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengawasan eksternal terhadap perusahaan tersebut sehingga perusahaan akan menghindari perilaku yang merugikan. Diyakini bahwa pengawasan dari pihak institusional dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. (Uyun, Ratno Agriyanto, 2020).

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis, sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

### **2.1.8 Kepemilikan Manajerial**

. Menurut (Wahyudin, 2020) kepemilikan manajerial adalah bagian dari manajemen organisasi selain memiliki saham di perusahaan. kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang tinggi, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap manajer secara pribadi sehingga manajer tidak bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan dapat membatasi perilaku manajer yang menyimpang, seperti memanipulasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan (Nabila, Zakaria and Purwohedi, 2023). Secara umum, kepemilikan manajerial yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pasar, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Nilai kepemilikan manajerial diasumsikan memiliki dampak yang substansial dan menguntungkan bagi Perusahaan karena menunjukkan komitmen manajemen terhadap perusahaan dan keyakinan mereka terhadap prospek masa depan perusahaan

## 2.2 Penelitian-Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut adalah tabel yang menunjukkan penelitian yang relevan.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian yang Relevan**

No	Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Analisis
1	Sherryliana Permata, JMV Mulyadi, Edy Supriyadi (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas terhadap <i>Integrated Reporting</i> dengan Auditor Eksternal sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di (BEI) Tahun 2014-2018)	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Variabel Dependen : <i>Integrated Reporting</i>	Regresi Data Panel Random Effect	ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>Integrated Reporting</i> , sedangkan variable profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Integrated Reporting</i>
2	Uyun Sundari, Ratno Agriyanto, & Dessy Noor Farida (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan terhadap <i>Integrated Reporting</i>	Variabel Independen : pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan umur perusahaan Variabel	Regresi linear Berganda	profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi, umur perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan

			Dependen : <i>Integrated Reporting</i>		terintegrasi. secara simultan profitabilitas, kepemilikan institusional dan umur perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi.
3	Febiola Wijaya, Fitri Agustina (2021)	Pengaruh Elemen-Elemen <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Integrated Reporting</i> (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019)	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional, Komposisi Komisaris Dependen, Dewan Direksi, dan Komite Audit Variabel Independen : <i>Integrated Reporting</i>	Regresi linear Berganda	Kepemilikan Institusional, Komposisi Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Integrated Reporting</i> .
4	Dewi Rejeki; Nurmala Ahmar (2022)	Pentingnya Penerapan <i>Integrated Reporting (Ir)</i>	Variabel Independen : Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP Variabel Dependen : <i>integrated reporting</i>	Analisis Konten	secara parsial hanya Ukuran Perusahaan yang berpengaruh terhadap <i>Integrated Reporting</i> . Sedangkan secara simultan Dewan Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP kesemuanya berpengaruh terhadap

					<i>Integrated Reporting</i>
5	Merda Moeljadi, Nastashia Angelina, Stevanus Pangestu (2022)	Determinan dan Konsekuensi Pengungkapan <i>Integrated Reporting</i>	Variabel Independen : ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , komisaris independen, dan kepemilikan institusional Variabel Dependen : <i>integrated reporting</i>	Analisis Regresi Data Panel	ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>integrated reporting</i> , Sedangkan variabel <i>leverage</i> , komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>integrated reporting</i> .
6	Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui, Indah Muliastari (2022)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Integrated Reporting</i>	Variabel Independen : Komite Audit, Direksi, Komisaris Dependen, dan Kepemilikan Institusi Variabel Independen : <i>Integrated Reporting</i>	Regresi linear Berganda	pelaporan terintegrasi dipengaruhi oleh dewan direksi dan komite audit, tetapi tidak dipengaruhi oleh komisaris independen dan kepemilikan institusional.
7	Alhafizh Afkar Akmal, Tri Utami Lestari (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan <i>Gender</i>	Variabel Dependen : Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, dan	Analisis Regresi Data Panel	Nilai probabilitas, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pelaporan terintegrasi,

		<i>Diversity Terhadap Penerapan Integrated Reporting</i>	<i>Gender Diversity</i> variabel independen : Penerapan <i>Integrated Reporting</i>		kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara parsial terhadap pelaporan terintegrasi, keberagaman gender tidak berpengaruh secara parsial terhadap pelaporan terintegrasi
8	Nabila, Adam Zakaria, Unggul Purwohedhi (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Pergantian Auditor, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Variabel Dependen : profitabilitas, komite audit, pergantian auditor, dan ukuran perusahaan Variabel Independen : integritas laporan keuangan	Regresi linear Berganda	profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit dan pergantian auditor tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan
9	Verda Pramaisella, Tri Utami Lestari (2023)	pengaruh <i>gender diversity</i> , komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap <i>integrated reporting</i> (studi kasus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode (2016-2020)	Variabel Independen : <i>gender diversity</i> , komite audit, dan ukuran perusahaan Variabel dependen : <i>integrated reporting</i>	Regresi linear Berganda	<i>gender diversity</i> , komite audit, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>integrated reporting</i> . Secara parsial hanya <i>gender diversity</i> yang berpengaruh signifikan terhadap <i>integrated reporting</i> , sedangkan komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>integrated reporting</i> .

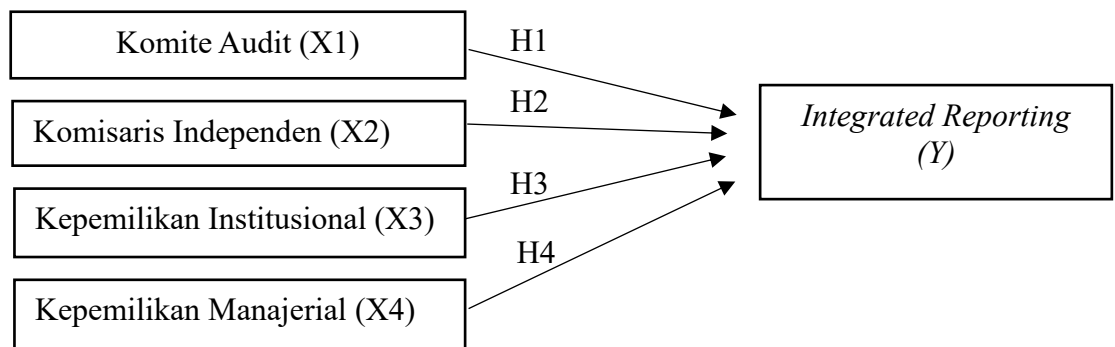
10	Muhammad Anugrah Prijonggo Taruno, Gideon Setyo Budiwitjaks ono (2025)	<i>Corporate Social Responsibility and Audit Committee Expertise disclosure on integrated reporting</i>	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility dan Audit Committee Expertise</i> Variabel Dependen : Integritas Laporan Keuangan	Regresi linear Berganda	<i>corporate social responsibility</i> dan komite audit dengan keahlian berdampak pada integritas laporan keuangan
----	------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya dari masalah yang sedang diteliti. Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan topik-topik yang akan dibahas kerangka konseptual ini ditafsirkan dari teori yang akan dipakai untuk menjadi landasan teori yang menghubungkan variabel yang diteliti

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh GCG terhadap *Integrated Reporting* sehingga kerangka konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1  
Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Peneliti menggunakan variabel Komite Audit sebagai X1, komisaris independen sebagai X2, kepemilikan Institusional sebagai X3, dan kepemilikan Manajerial sebagai X4. Variabel *integrated reporting* digunakan oleh peneliti sebagai variabel dependen.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Integrated Reporting*

Dalam melakukan pengawasan audit tahunan, komite audit sejatinya memiliki jadwal pertemuan rutin sehingga mereka tidak hanya berfokus pada fungsi pokok saja, tetapi juga dapat menyentuh substansi pelaporan perusahaan secara lebih luas. Komite audit bertugas memberikan nasihat kepada komisaris mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan, memeriksa kebenaran laporan manajemen, dan

mendukung pekerjaan manajemen supaya dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan melakukan tugasnya, komite audit dapat mengoptimalkan *monitoring* terhadap performa manajemen sehingga kinerja manajemen menjadi efektif dan efisien serta dapat memberikan dorongan meningkatkan dalam pengungkapan informasi secara komprehensif dan transparan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atau *stakeholder*.

Dengan demikian, komite audit dapat mendorong publikasi *integrated reporting* sehingga dapat mewujudkan dan menumbuhkan nilai Perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta komite audit dapat membantu aspek-aspek pelaksanaan tata Kelola menjadi efektif dalam praktik *integrated reporting*. Melihat juga pada hasil penelitian terdahulu oleh (Wijaya and Agustina, 2021), (Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliastari, 2023) dan (Anugrah *et al.*, 2025). komite audit memiliki pengaruh positif dan besar terhadap *integrated reporting*.

H1 : Komite Audit Berpengaruh Terhadap *Integrated Reporting*

#### **2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Integrated Reporting***

Komisaris independen memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan, yaitu memastikan terciptanya keputusan yang objektif dalam menilai kinerja manajemen oleh dewan komisaris. Berdasarkan perspektif teori keagenan, keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan transparansi kinerja manajemen dan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan, serta antara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Keberadaan komisaris

independen akan meminimalisir tindakan manajemen yang mengutamakan kepentingan pribadi. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas serta pihak terkait. (Lodovicus Lasdi, 2021)

Sejalan dengan hasil penelitian (Wijaya and Agustina, 2021), dan (Lodovicus Lasdi, 2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pelaporan terintegrasi, komisaris independen juga memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja manajemen secara luas dan menyeluruh. Dengan demikian, manajemen akan mengungkapkan informasi secara lebih andal dan tidak memihak

H2 : Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap *Integrated Reporting*

#### **2.4.3 Pengaruh kepemilikan Institusional Terhadap *Integrated Reporting***

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan aset manajemen. Tingginya tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan akan meningkatkan luasnya informasi yang diungkapkan yang dapat dilakukan melalui konsep pelaporan *integrated reporting*,

Adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen, dimana keberadaan kepemilikan ini dapat dilihat cukup

mampu untuk menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan institusional merupakan salah satu dari mekanisme dari corporate governance di dalam perusahaan. Menurut teori agensi semakin besar proporsi kepemilikan institusional di dalam sebuah perusahaan maka akan meningkatkan Tingkat pengawasan terhadap agen (Jensen & Meckling, 1976). Pengawasan dilakukan untuk mencegah agent berperilaku menyimpang sehingga mencegah terjadinya *agency problem* (Wijaya and Agustina, 2021)

Studi sebelumnya dalam penelitian (Wijaya and Agustina, 2021) dan (Permata, JMV and Edy, 2020) yang meneliti dampak kepemilikan institusional pada *integrated reporting*, semuanya mencapai kesimpulan yang sama, kepemilikan institusional berpengaruh pada *integrated reporting*.

H3 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Integrated Reporting*

#### **2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Integrated Reporting***

Kepemilikan manajerial, yang menunjukkan dua peran manajemen suatu perusahaan, terutama sebagai manajer dan juga sebagai pemegang saham, dapat berdampak pada *integrated reporting*. Kepemilikan manajerial akan berdampak pada bidang pengungkapan sukarela atau terintegrasi karena akan membuat manajer cenderung bertindak dengan cara yang akan

memaksimalkan keuntungan keuangan mereka sendiri dan lebih mungkin bagi mereka untuk membuat Keputusan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepemilikan manajemen yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mengungkapkan *integrated reporting* mereka secara lebih menyeluruh, menurut penelitian (Akmal and Lestari, 2023), dan (Permana, Aruddy and Jahroh, 2023). kepemilikan Manajerial semuanya mencapai kesimpulan yang sama, kepemilikan Manajerial berpengaruh pada *integrated reporting*.

H4 : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap *Integrated Reporting*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu dan penelitian ini dimulai sejak bulan Februari 2025 sampai Juni 2025. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan yang tergabung dalam index LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu periode 2020-2023.

#### **3.2 Desain Penelitian**

Desain Penelitian merupakan rancangan utama dari suatu penelitian yang menyatakan metode-metode yang di gunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan filosofi kepositifan, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap *Integrated Reporting* pada perusahaan yang tergabung dalam index LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2020 – 2023.

### 3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

Menurut Sugiyono (2019) variabel merupakan objek atau kegiatan yang memiliki atribut, sifat, atau nilai dengan variasi tertentu yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu *statistic* dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai “Pengaruh GCG Terhadap *Integrated Reporting*”. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen/variabel bebas dan variabel dependen/variabel terikat.

#### 3.3.1 Variabel Independen (X)

##### a. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan melaporkan tanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris memenuhi kewajiban pengawasannya. Salah satu kriteria untuk menilai komite audit adalah ukurannya. Pengukuran tersebut sebagaimana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliasari, 2023) melakukan pengukuran tersebut. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengukuran:

$$\sum \text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

b. Komisaris Independen

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengolah perusahaan atau pihak manajemen. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dilihat dari *annual report* masing-masing perusahaan. Rumus menghitung ukuran dewan komisaris independen :

$$\sum \text{Komisaris Independen} = \text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}$$

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan sebuah presentase kepemilikan suatu pihak di suatu perusahaan. Pengukuran Kepemilikan Institusional dapat dilakukan dengan membagi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dengan jumlah total saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham Milik Institusi}}{\text{Total Saham}}$$

#### d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham Perusahaan oleh manajemen. Manajer yang memiliki kepemilikan saham yang besar dapat mengarahkan manajer supaya berusaha lebih giat untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pengukuran Kepemilikan Manajerial dilakukan dengan mengetahui jumlah prosentase saham milik manajemen (komisaris dan direksi).

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham Milik Komisaris dan Direksi}}{\text{Total Saham}}$$

#### 3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Pengungkapan *Integrated Reporting* adalah suatu konsep pendekatan pada pelaporan terbaru dengan mengintegrasikan kembali informasi keuangan dengan informasi non keuangan perusahaan. *Integrated Reporting* adalah komunikasi ringkas tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja dan prospek perusahaan menghasilkan penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah dan Panjang. *Integrated Reporting* hadir untuk mengatasi kritik atas permasalahan yang timbul akibat kekurangan-kekurangan pelaporan perusahaan sebelumnya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih baik terhadap penggunaannya (IIRC, 2013).

Penelitian ini menggunakan daftar periksa yang dirancang oleh NKONKI untuk penelitian yang terdiri dari 9 kategori utama dengan total 64 item (pertanyaan), yaitu 2 item Etika Kepemimpinan (*Ethical Leadership*) dan *Corprorate Citizen*, 26 item Dewan Dan Direktur (*Board and Directors*), 11 item Komite Audit (*Audit Committees*), 3 item Tata Kelola Risiko (*The Governance of Risk*), 1 item Tata Kelola Teknologi Informasi (*The Governance of Information Technology*), 1 item Kepatuhan terhadap Hukum, Kode, Aturan dan Standar (*Compliance with Laws, Codes, Rules and Standards*), 3 item Audit Internal (*Internal Audit*), 2 item Mempertahankan Hubungan *Stakeholders* (*Governing Stakeholders Relationship*), 15 item Pengungkapan *Integrated Reporting* (*Integrated Reporting Disclousure*).

Pengukuran pengungkapan *integrated reporting* dilakukan dengan mengamati ada atau tidaknya suatu item informasi dalam laporan tahunan. Jika item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan, diberikan skor 0, dan jika item informasi dimuat dalam laporan tahunan, diberikan skor 1. Skor pengungkapan *integrated reporting* dihitung sebagai rasio antara nilai aktual yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan nilai total berdasarkan daftar periksa. Semakin besar jumlah pengungkapan yang dilampirkan dalam *annual report* perusahaan maka perusahaan tersebut mengindikasikan bahwa sudah melaporkan dalam bentuk *integrated reporting*.

$$IR = \frac{\text{Total item yang diungkapkan}}{64 \text{ Item}}$$

### 3.3.3 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel merupakan suatu cara menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Operasional variabel memiliki tujuan untuk menentukan skala dari masing-masing variabel, yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator- indikator Variabel independen dan dependen menggunakan skala rasio karena karakteristik skala rasio sudah termasuk skala nominal, ordinal, dan interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Dalam penelitian ini operasional variabelnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**

**Operasional Variabel dan Skala Penelitian**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
X1 : Komite Audit	Komite yang membantu dewan komisaris menjalankan tugas. (Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliasari, 2023)	$\sum \text{Ukuran Komite Audit}$ $= \text{Jumlah Komite Audit}$	Rasio

X2 Komisaris Independen	: Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama (Yulyan, Yadiati and Aryonindito, 2021).	$\sum \text{Komisaris Independen}$ $= \text{Jumlah Dewan Komisaris Inde}$	Rasio
X3 Kepemilikan Institusional	: kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi dan bentuk institusi lain(Uyun, Ratno Agriyanto, 2020)	$\text{Kepemilikan Institusional}$ $= \frac{\text{Saham Milik Institusi}}{\text{Total Saham}}$	Rasio
X4 Kepemilikan Manajerial	: Kepemilikan Manajerial dapat diartikan sebagai kepemilikan saham	$\text{Kepemilikan Manajerial}$ $= \frac{\text{Saham Milik Komisaris dan D}}{\text{Total Saham}}$	Rasio

	<p>perusahaan oleh manajemen (manajer dan dewan direksi) (Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliasari, 2023).</p>		
<p>Y : <i>Integrated Reporting</i></p>	<p>Laporan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan yang melibatkan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam satu dokumen (Cooray, Gunarathne and Senaratne, 2020)</p>	$IR = \frac{\text{Total item yang diungkapkan}}{64 \text{ Item}}$	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

### **3.4 Populasi Dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini populasinya adalah Perusahaan yang tergabung dalam index LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023 yang berjumlah 45 perusahaan. Pertimbangan untuk memilih sebagai populasi dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan Perusahaan.

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam index LQ-45 memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus serta karakteristik sampel yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Kriteria tersebut adalah :

1. Perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan yang berturut - turut tidak tergabung dalam Index LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023.

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam pelaporan.
4. Data perusahaan yang tidak mendukung penelitian.

Berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan dengan 4 tahun pengamatan dan menggunakan data tahunan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Adapun proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dapat dilihat pada prosedur pemilihan sampel yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Kriteria pemilihan sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI).	45
2	Perusahaan yang berturut - turut tidak tergabung dalam Index LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023.	(21)
3	Perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam pelaporan.	(5)
4	Data perusahaan yang tidak mendukung penelitian.	(7)
Jumlah perusahaan yang terpilih menjadi sampel		12

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan berupa laporan tahunan selama 4 tahun sehingga di peroleh jumlah observasi sebanyak 48 sampel. Adapun 12 perusahaan yang di jadikan sampel sebagai berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Daftar Sampel Penelitian**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ANTM	Aneka Tambang Tbk
2	ASII	Astra International Tbk
3	BBCA	Bank Central Asia Tbk
4	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
5	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
7	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
8	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
9	PTBA	Bukit Asam Tbk
10	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
11	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk
12	UNTR	United Tractors Tbk

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

### 3.5 Sumber Data dan Skala Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2019) Data sekunder merupakan data penelitian yang

tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dan berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan Tahunan perusahaan yang memenuhi kriteria *purposive sampling* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang diperoleh berasal dari situs resmi BEI yaitu [www.idx.com](http://www.idx.com).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh sumber terkumpul. Langkah yang paling utama dalam penelitian yaitu Teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2019). Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik dokumentasi dengan mengambil data berbentuk laporan tahunan perusahaan, gambaran umum perusahaan dan dokumen penunjang lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Penelitian ini akan diolah menggunakan *software SPSS (Statistical Package for Social Science)* agar mempermudah analisis dalam penelitian ini.

#### **3.6.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Kegunaan utama

statistik deskriptif ialah untuk menggambarkan jawaban-jawaban observasi (Sarwono, 2006: 138). Ringkasan jawaban-jawaban observasi ditampilkan dalam bentuk seperti distribusi frekuensi, distribusi persen, *mean*, *median*, standar deviasi, varian, modus dan lain-lain.

### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Persamaan regresi berganda akan menghasilkan nilai parameter model praduga yang valid dan *BLUE* (*Blue Linear Unbiased Estimator*) untuk mengetahui kelayakan sebuah data untuk diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pengujian asumsi klasik ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Sarjono dan Julianita (2011:53) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Menurut Ghozali (2018) terdapat dua cara untuk mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara uji statistik.

##### 1) Uji Statistik

Salah satu uji statistik yang dapat digunakan yaitu uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Dasar dalam melihat hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov yaitu apabila hasil signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa data yang diuji dalam penelitian tersebut tidak normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel *independent*. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orthogonal. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi adalah dengan cara melihat besaran dari nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan juga nilai *Tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian lain setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya gejala multikolinieritas yaitu adalah - nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $> 10,00$  - nilai *Tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $> 10,00$  (Ghozali, 2018).

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas ini bertujuan untuk melihat ketidaksamaan variansi dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil yang diinginkan pada pengujian ini adalah tidak terjadi korelasi antar masing-masing variabel. Jika variansi dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homokedastisitas dan jika

varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Terdapat beberapa cara untuk dapat mendeteksi heteroskedastisitas. Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu Grafik Plot.

Untuk uji grafik yaitu menggunakan *scatterplot*. Apabila titik-titik dalam hasil uji tersebut membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka menunjukkan terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila tidak membentuk pola yang jelas, kemudian titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat disebut juga homoskedastisitas. (Ghozali, 2018)

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Cara yang digunakan dalam mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW). Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi antara variabel yang di analisis. Ketentuan pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi:

- a) Terjadi autokolerasi positif jika DW dibawah -2 ( $DW < -2$ ).
- b) Tidak terjadi autokolerasi jika DW berada diantara -2 dan 2 atau  $-2 < DW < 2$ .

### 3.6.3 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas satu variabel terikat. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

$Y$  : *Integated Reporting*

$a$  : Nilai Konstanta

$b_1, b_2, b_3, b_4$  : Koefisien Regresi

$X_1$  : Komite Audit

$X_2$  : Komisaris Independen

$X_3$  : Kepemilikan Institusional

$X_4$  : Kepemilikan Manajerial

$e$  : Standar Error

### 3.6.4 pengujian hipotesis

#### a. Uji T (*t-test*)

Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval (Sarwono, 2006). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam model regresi ini sebesar 95% atau tingkat  $\alpha = 0,05$ .

Jika nilai *p-value* lebih kecil daripada  $\alpha = 0,05$  maka hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Jika hasil menunjukkan  $H_a$  diterima, maka variabel independen dalam model ini secara parsial berpengaruh terhadap tingkat keselarasan laporan tahunan dengan rerangka IR.

#### b. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur proporsi penurunan variabel dependen sebagai akibat penggunaan variabel-variabel independen dalam model regresi. Jika nilai ( $R^2$ ) mendekati angka satu, maka variabel independen semakin mempunyai pengaruh kuat. Sedangkan ( $R^2$ ) sama dengan 0, maka tidak ada pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Pada bagian ini dilakukan analisis data yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan index LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Integrated Reporting* (IR). Struktur GCG menggunakan Proporsi Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial. Berdasarkan perumusan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan sebelumnya dan hipotesis yang diajukan, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

#### **4.2 Profil Prusahaan**

Adapun 12 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. PT. Aneka Tambang Tbk

PT. ANTAM (Persero) Tbk atau ANTAM, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam melalui diversifikasi dan integrasi usaha dengan aktivitas eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

serta pemasaran bahan mineral dan logam di Indonesia. ANTAM didirikan pada 5 Juli 1968 sebagai hasil penggabungan dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Intan dan Proyek-proyek eks Bapetamb. ANTAM terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 27 November tahun 1997 dengan kode perdagangan saham ANTM. Kepemilikan saham ANTAM adalah 65% oleh Pemerintah Indonesia dan 35% sisanya dimiliki oleh investor publik. Produk utama ANTAM saat ini terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) Produk mineral dan mineral olahan, terdiri dari:
  - a. Bijih Nikel
  - b. Feronikel
  - c. Emas
  - d. Perak
  - e. Bijih bauksit
- 2) Jasa pemurnian logam mulia (emas dan perak)
- 3) Jasa eksplorasi pertambangan (Geomin) Daerah operasi ANTAM tersebar di berbagai lokasi di Indonesia, yang terdiri dari 13 sebaran lokasi operasional dengan masing-masing jenis produk, yaitu:
  - a. Tambang Nikel dan Pabrik Feronikel berlokasi di Pomalaa
  - b. Tambang Nikel berlokasi di Tanjung Buli
  - c. Tambang Emas dan Pabrik berlokasi di Pongkor
  - d. Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia berlokasi di Jakarta 5.

- e. Tambang Bauksit berlokasi di Tayan
- f. Unit Geomin berlokasi di Jakarta
- g. Pascatambang Bauksit berlokasi di Kijang
- h. Pascatambang Emas berlokasi di Cikotok
- i. Pascatambang Pasir Besi berlokasi di Kutoarjo
- j. Pascatambang Nikel berlokasi di Pulau Gebe Gebe Island
- k. Pascatambang Pasir Besi berlokasi di Cilacap
- l. Pascatambang Batu Kapur berlokasi di Wawo
- m. Kantor Pusat berlokasi di Jakarta

Untuk mengendalikan kegiatan operasi di berbagai area penambangan tersebut, ANTAM memiliki Kantor Pusat di Jakarta.

Untuk memaksimalkan kegiatan pemasaran, ANTAM memiliki kantor perwakilan di Tokyo, Jepang dan Shanghai, Cina.

## 2. PT Astra International Tbk

PT Astra International Tbk didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama awal PT Astra International Inc. oleh Drs. Tjia Kian Tie, William Soerdjaya (Tjia Kian Liong), dan E. Harman (Liem Peng Hong). Pada awal berdirinya, perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan umum seperti penjualan soft drink merek Prem Club serta ekspor-impor hasil bumi.

Seiring perkembangan ekonomi nasional, pada tahun 1965 Astra mulai mengalihkan usahanya ke bidang otomotif, dengan menjadi importir kendaraan bermotor, alat berat, dan peralatan teknik untuk

mendukung pembangunan. Langkah penting terjadi pada 1 Juli 1969, saat Astra mendapat pengakuan resmi sebagai agen tunggal mobil Toyota di Indonesia dan membentuk divisi khusus yang menangani pemasaran Toyota.

Pada tahun 1971, Astra bekerja sama dengan Toyota Motor Company dari Jepang dan mendirikan PT Toyota Astra Motor (TAM), yang bertugas mengimpor mobil Toyota dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) untuk kemudian dirakit dan didistribusikan di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1973, Astra juga ditunjuk sebagai agen tunggal mobil Daihatsu, memperluas cakupan bisnis otomotifnya di tanah air.

Karena perkembangan bisnis yang pesat, Astra mendirikan PT Astra Motor Sales (AMS) pada 1 Januari 1976 untuk menangani penyaluran utama kendaraan Toyota dan membuka banyak cabang di berbagai daerah. Pada Maret 1990, Astra melakukan go public, dan setahun kemudian, tepatnya 19 Februari 1991, nama perusahaan resmi berubah menjadi PT Astra International Tbk.

Khusus untuk wilayah Bandung, cabang penjualan Toyota yang awalnya dikelola oleh AMS kini dikenal sebagai AUTO2000, yaitu dealer resmi Toyota yang merupakan bagian dari jaringan utama Astra. AUTO2000 kini menjadi salah satu dealer terbesar dan paling dikenal di Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor III No. 3, Jakarta.

### 3. PT. Bank Central Asia Tbk

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 21 Februari 1957 dengan nama awal Bank Central Asia NV. Seiring perkembangan dan dinamika ekonomi Indonesia, BCA mengalami berbagai perubahan signifikan dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2000 dengan kode saham BBCA di Bursa Efek Indonesia (BEI).

BCA menawarkan berbagai layanan keuangan, mulai dari perbankan individu, perbankan bisnis, hingga layanan transaksi elektronik seperti internet banking, mobile banking, dan dompet digital. Produk-produknya meliputi tabungan, giro, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan layanan wealth management. Inovasi teknologi dan kemudahan akses menjadi keunggulan utama BCA dalam menarik nasabah dari berbagai segmen.

BCA dikenal sebagai bank yang fokus pada pelayanan nasabah dan inovasi digital. Hingga saat ini, BCA memiliki jaringan yang luas dengan ribuan kantor cabang dan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, BCA terus memperkuat kehadirannya secara digital melalui platform seperti myBCA, KlikBCA, dan BCA mobile.

BCA juga memiliki sejumlah anak usaha yang mendukung kegiatan bisnisnya, di antaranya BCA Syariah, BCA Finance, BCA Insurance, dan BCA Life, yang bergerak di sektor pembiayaan,

asuransi umum, serta asuransi jiwa. Dengan strategi bisnis yang kuat dan reputasi yang baik, BCA terus mencatatkan kinerja keuangan yang solid serta pertumbuhan jumlah nasabah yang stabil setiap tahunnya.

Per akhir 2023, BCA mencatatkan total aset lebih dari Rp 1.400 triliun, menjadikannya salah satu bank dengan aset terbesar di Indonesia. Dengan komitmen pada prinsip kehati-hatian, pelayanan prima, dan pengembangan teknologi, BCA terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri perbankan nasional.

#### 4. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Bank Negara Indonesia (BNI) didirikan pada bulan Juli 1946 BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus – menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek dimasa depan yang lebih baik setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi BNI, sedangkan tahun pendirian “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini Bank BNI memiliki 168 kantor cabang, 912 cabang pembantu domestik serta 693 outlet lainnya. Selain itu, jaringan Bank BNI juga meliputi 4 kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo dan London serta 1 kantor perwakilan di New York. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah Negara Republik Indonesia, dengan persentase kepemilikan sebesar 60,00%.

5. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama awal *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*. Bank ini merupakan lembaga keuangan pertama yang melayani masyarakat pribumi. Setelah kemerdekaan Indonesia, BRI diakui sebagai bank pemerintah pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946.

Perjalanan BRI tidak selalu mulus. Saat agresi militer Belanda pada 1948, operasional BRI sempat terhenti dan baru aktif kembali setelah Perjanjian Renville tahun 1949 dengan nama Bank Rakyat Indonesia Serikat. Selama periode 1960-an, BRI beberapa kali bergabung dan diintegrasikan dengan lembaga lain, termasuk ke dalam Bank Indonesia dan Bank Negara Indonesia Unit II. Namun, berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1967 dan 1968, BRI kembali berdiri sendiri sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992, melalui UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan kepemilikan penuh pemerintah. Pada tahun 2003, pemerintah melepas 30% saham BRI ke publik, menjadikannya perusahaan terbuka dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fokus utama BRI tetap pada pembiayaan sektor UMKM dan usaha kecil, yang terlihat dari peningkatan signifikan penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) dari tahun ke tahun.

Hingga kini, BRI memiliki jaringan operasional luas dengan lebih dari 4.000 unit kerja, termasuk kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang dalam dan luar negeri, BRI Unit, serta Pos Pelayanan Desa. Salah satu bagian dari jaringan tersebut adalah BRI Cabang Makassar Somba Opu Unit Perintis, yang merupakan kantor cabang pembantu yang aktif dalam mendukung inklusi keuangan di wilayahnya.

#### 6. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Bank BTN didirikan pada tahun 1897 dengan nama Postspaarbank. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1950, namanya diubah menjadi Bank Tabungan Pos, dan kemudian menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963. Sejak tahun 1974, pemerintah menunjuk Bank BTN sebagai satu-satunya lembaga penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Pada 17 Desember 2009, Bank BTN melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui skema KIK-EBA (Efek Beragun Aset). Selama lebih dari enam dekade, BTN konsisten menyediakan produk pembiayaan perumahan, baik KPR subsidi maupun KPR non-subsidi, untuk mendukung masyarakat dalam memiliki rumah impian.

Kini, BTN termasuk dalam 7 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dan penyaluran kredit. Bank ini terus menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam pembiayaan sektor perumahan, serta bercita-cita menjadi perusahaan kelas dunia yang memberikan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Bank BTN memfokuskan bisnisnya pada tiga pilar utama: KPR dan Perbankan Konsumer, Perumahan dan Perbankan Komersial, serta Perbankan Syariah, dengan layanan mencakup pembiayaan,

pendanaan, dan jasa perbankan lainnya yang mendukung sektor perumahan di Indonesia.

7. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menstabilkan sektor keuangan nasional pasca krisis moneter 1998. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75/1998, empat bank BUMN—Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)—dilebur menjadi satu entitas baru, yaitu Bank Mandiri.

Masing-masing bank yang tergabung memiliki sejarah panjang. Bank Bumi Daya berakar dari nasionalisasi De Nationale Handelsbank dan fokus pada pembiayaan industri dan perdagangan. Bank Dagang Negara berasal dari lembaga perbankan Belanda yang berdiri tahun 1857 dan kemudian membiayai sektor industri dan pertambangan. Bank Exim mendukung kegiatan ekspor-impor, sedangkan Bapindo, yang berawal dari Bank Industri Negara, berperan dalam pembiayaan proyek strategis jangka menengah dan panjang.

Pasca-merger, Bank Mandiri berkembang pesat. Pada akhir tahun 2013, bank ini mencatatkan aset sebesar Rp 733,1 triliun, laba bersih Rp 18,2 triliun, serta melayani lebih dari 14 juta rekening.

Kepemilikannya terdiri dari 60% milik pemerintah dan 40% publik, menjadikannya bank BUMN terbesar di Indonesia.

Bank Mandiri memiliki jaringan yang luas, meliputi lebih dari 2.000 kantor cabang, 11.000+ ATM, dan kantor cabang internasional di tujuh negara. Salah satunya adalah KCP Jalan Riau Pekanbaru, yang berdiri sejak 2004 dan memperkuat kehadiran serta komitmen Bank Mandiri dalam melayani kebutuhan finansial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

8. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Intikusuma, dan mulai beroperasi secara komersial di tahun yang sama. Kantor pusatnya berada di Indofood Tower, Jakarta, dengan jaringan pabrik dan perkebunan yang tersebar di seluruh Indonesia serta luar negeri, seperti Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Nigeria, dan beberapa negara lainnya.

Berdasarkan anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan Indofood mencakup industri makanan olahan, minuman ringan, minyak goreng, penggilingan gandum, agrobisnis, perdagangan, dan jasa. Indofood memiliki sejumlah merek ternama di berbagai segmen produk, seperti Indomie, Supermi, Chitato, Indomilk, Bimoli, Palmia, Promina, SUN, dan La Fonte, yang sudah dikenal luas oleh masyarakat.

Indofood juga memiliki dua anak usaha besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP). Pada 14 Juli 1994, INDF melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan harga Rp6.200 per saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Per 28 Februari 2022, pemegang saham terbesar Indofood adalah First Pacific Investment Management Limited dengan kepemilikan sebesar 50,07%. Entitas ini merupakan anak perusahaan tidak langsung dari First Pacific Company Limited, yang dikendalikan oleh Bapak Anthoni Salim secara tidak langsung.

#### 9. PT. Bukit Asam Tbk

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) merupakan BUMN yang didirikan pada 2 Mei 1981, dengan kantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Salah satu unit strategisnya adalah Unit Pelabuhan Tarahan yang berlokasi di Bandar Lampung dan beroperasi sejak 1986 sebagai Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) untuk pengapalan batubara ke PLTU Suralaya.

PTBA memiliki tiga pelabuhan batubara utama: Tarahan (Lampung), Kertapati (Palembang), dan Teluk Bayur (Padang), di mana Pelabuhan Tarahan merupakan yang terbesar dengan luas 55 hektar. Angkutan batubara dari tambang di Tanjung Enim ke Tarahan dilakukan melalui kerja sama dengan PT Kereta Api

Indonesia (KAI) menggunakan Kereta Api Babaranjang, menempuh jarak sekitar 420 km dengan 19 rangkaian kereta setiap hari.

Pelabuhan Tarahan memiliki empat stockpile berkapasitas total 700.000 ton, dan kemampuan bongkar muat hingga 12 juta ton per tahun. Peralatan utama yang digunakan antara lain Rotary Car Dumper (RCD), belt conveyor, stacker reclaimer, serta ship loader dan barge loading. Dermaga yang dimiliki dapat melayani kapal dengan kapasitas hingga 205.000 DWT, baik untuk kebutuhan domestik (terutama PLTU) maupun ekspor ke negara-negara Asia dan Eropa.

Untuk mendukung kelancaran pasokan ke PLTU, telah dibangun Dermaga Tongkang Batubara (Dermaga I) yang melayani tongkang 12.000 DWT. Selain itu, Unit Pelabuhan Tarahan juga dilengkapi PLTU 2 x 8 MW yang dikelola oleh anak perusahaan PT BEST (Bukit Energi Servis Terpadu), serta memasok listrik ke PLN. Pelabuhan ini juga melayani PLTU Tarahan di Lampung Selatan melalui jalur Coal Handling Facility (CHF).

#### 10. PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk

PT. Telkom Indonesia Tbk (Persero) atau disebut Telkom berdiri sejak 23 Oktober 1856 dengan kantor pusat berkedudukan di Jalan Japati No. 1 Bandung, Jawa Barat. PT. Telkom Indonesia Tbk memiliki total 572 jaringan kantor pelayanan (Plasa Telkom) yang

tersebar di 34 provinsi dan 511 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan dukungan 25.284 karyawan. Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang bergerak di bidang jasa layanan jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,56% sedangkan 47,44% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perseroan diperdagangkan di BEI dan NYSE. PT. Telkom Indonesia Tbk terus berinovasi serta membangun sinergi seluruh produk, layanan, dan solusi melalui seluruh entitas anak serta memperkuat organisasi dengan pembentukan Board of Executive (“BoE”).BoE mewadahi mekanisme parenting terhadap entitas anak dengan mengelompokkan entitas anak dalam empat kategori, yaitu bisnis seluler, media, infrastruktur, dan internasional. Bisnis seluler dipimpin PT. Telekomunikasi Indonesia Selular (“Telkomsel”), bisnis media dipimpin PT. Multimedia Nusantara (“TelkomMetra”) bisnis infrastruktur berada dalam koordinasi PT. Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (“TelkomInfra”), sedangkan bisnis internasional dikendalikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia International (“Telin”).

#### 11. PT. Sarana Menara Nusantara Tbk

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) adalah perusahaan infrastruktur digital yang didirikan pada tahun 2008 dan berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. TOWR merupakan induk dari PT

Protelindo dan PT iForte, yang fokus pada penyewaan menara telekomunikasi dan layanan jaringan fiber optik. Sejak 8 Maret 2010, saham TOWR tercatat di Bursa Efek Indonesia dan tergabung dalam indeks LQ45, IDX ESG Leaders, dan SMinfra18. Saat ini, TOWR mengelola lebih dari 35.000 menara dan 170.000 km jaringan fiber optik yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu operator infrastruktur telekomunikasi terbesar di tanah air. Layanan TOWR berperan penting dalam memperkuat konektivitas digital bagi operator seluler dan pelaku industri teknologi.

Pada tahun 2024, TOWR mencatat pendapatan lebih dari Rp 12,7 triliun dan laba bersih Rp 3,3 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi menara, peningkatan jumlah penyewa, dan perluasan jaringan fiber optik. TOWR juga mengembangkan solusi energi terbarukan seperti power-as-a-service dan panel surya sebagai bagian dari komitmen ESG.

Dengan strategi yang agresif namun terukur, TOWR berupaya menjadi penggerak utama transformasi digital nasional, tak hanya lewat ekspansi fisik, tapi juga integrasi teknologi masa depan. Kombinasi aset kuat, pendanaan solid, dan eksekusi yang baik menjadikan TOWR sebagai salah satu pilar utama infrastruktur digital di Indonesia.

## 12. PT. United Tractors Tbk

PT United Tractors Tbk (UNTR) adalah distributor peralatan berat terbesar di Indonesia, didirikan pada 13 Oktober 1972. Perusahaan memasarkan produk dari merek-merek ternama seperti Komatsu, UD Trucks, Scania, Bomag, Tadano, dan Komatsu Forest. Pada 19 September 1989, UNTR resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, dengan PT Astra International Tbk sebagai pemegang saham mayoritas.

UNTR mengoperasikan bisnisnya melalui tiga pilar utama: distribusi mesin konstruksi, kontraktor penambangan, dan pertambangan batu bara. Perusahaan memiliki jaringan luas yang mencakup 19 kantor cabang, 22 kantor pendukung, dan 11 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

Selain menjadi distributor, UNTR juga aktif sebagai kontraktor pertambangan dan telah memulai ekspansi ke sektor pertambangan batu bara. Melalui anak perusahaannya, PT Traktor Nusantara, UNTR menyediakan layanan distribusi, sewa, dukungan purna jual, dan peralatan bekas untuk berbagai sektor seperti industri, pertanian, power & drive, dan konstruksi jalan.

Dengan komitmen menjadi “Partner in Progress”, Traktor Nusantara menjamin layanan menyeluruh mulai dari perencanaan, pengiriman, pengoperasian, pemeliharaan, hingga revitalisasi peralatan. Didukung oleh teknisi berpengalaman dan jaringan

layanan luas, UNTR berfokus pada efisiensi dan nilai tambah bagi pelanggan dalam setiap lini bisnisnya.

### 4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diambil maka penelitian ini bersifat kuantitatif karena data yang diambil bentuknya angka dan bersumber dari laporan Tahunan. Studi yang dilakukan pada perusahaan index LQ45 periode 2020 – 2023. Dari kriteria yang ditentukan yaitu Perusahaan yang tahun berturut – turut tergabung dalam Index LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2023, Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan, dan Data perusahaan yang tidak mendukung penelitian. maka sampel yang dapat diambil sebanyak 12 perusahaan. Deskripsi laporan tahunan yang disajikan dianalisa untuk melihat pengaruh *Good Corporate Governance* yang di proksikan Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Instiusional, dan Kepemilikan Manajerial. Data yang diambil diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS v27 dengan Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokolerasi) dan Uji Hipotesis (Uji Linear Berganda, Uji Signifikansi Parsial (Uji T), dan Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)).

Berikut adalah data penelitian yang digunakan yaitu *Good Corporate Governance* yang di proksikan Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Instiusional, dan Kepemilikan Manajerial. Data asli hasil penelitian terlampir dalam (Lampiran).

#### 4.4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan gambaran dan deskripsi mengenai data variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan deskripsi mengenai mean, maksimum, minimum dan standar deviasi hasil uji deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	48	3	8	4.56	1.583
Komisaris Independen	48	.33	.83	.5132	.14639
Kepemilikan Institusional	48	.501	.917	.60174	.103279
Kepemilikan Manajerial	48	.0001	37.1456	5.039151	12.1832353
Integrated Reporting	48	.56	.80	.6837	.06110
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 diatas hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif menunjukkan bahwa selama periode penelitian yaitu tahun 2020 sampai 2023 variabel independent Komite Audit mempunyai nilai minimum sebesar 0.3 dan nilai maksimum sebesar 0.8. Sementara nilai standar deviasi 1.583 dan nilai rata-rata sebesar 4.56. Berdasarkan nilai rata-rata menunjukkan nilai Komite Audit selama 4 tahun, diperoleh nilai Komite Audit tahun 2020 sebesar 5, tahun 2021 sebesar 5 tahun 2022 sebesar 5, kemudian 2023 sebesar 5. Dengan demikian selama 3 tahun terakhir jumlah rata-rata Komite Audit cenderung stabil pada angka 5. Stabilitas ini

mencerminkan konsistensi perusahaan-perusahaan dalam menjaga struktur tata kelola yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya dalam aspek pengawasan internal.

Variabel independent Komisaris Independen mempunyai nilai minimum sebesar 0.33 dan nilai maksimumnya sebesar 0.83. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0.14639 dan nilai rata-rata sebesar 0.5132. Berdasarkan nilai rata-rata menunjukkan nilai Komisaris Independen selama 4 tahun, diperoleh dari nilai rata-rata Komisaris Independen tahun 2020 sebesar 0,4, tahun 2021 sebesar 0,6, tahun 2022 sebesar 0,5, kemudian tahun 2023 sebesar 0,5. Dengan demikian, selama 4 tahun terakhir Komisaris Independen mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021, di mana rata-rata Komisaris Independen naik dari 0,4 menjadi 0,6. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 0,5 dan kemudian stabil hingga akhir periode..

Variabel independent Kepemilikan Institusional mempunyai nilai minimum sebesar 0.501 dan nilai maksimumnya sebesar 0.917. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0.103279 dan nilai rata-rata sebesar 0.60174. Berdasarkan nilai rata-rata menunjukkan nilai Kepemilikan Institusional selama 4 tahun, diperoleh dari nilai rata-rata Kepemilikan Institusional tahun 2020 sebesar 0,60, tahun 2021 sebesar 0,60, tahun 2022 sebesar 0,60, kemudian tahun 2023 sebesar 0,60. Dengan demikian, selama 4 tahun terakhir Kepemilikan Institusional mengalami stabilitas.

Variabel independent Kepemilikan Manajerial mempunyai nilai minimum sebesar 0.0001 dan nilai maksimumnya sebesar 37.1456. Sementara nilai standar deviasi sebesar 12.1832353 dan nilai rata-rata sebesar 5.039151. Berdasarkan nilai rata-rata menunjukkan nilai Kepemilikan Manajerial selama 4 tahun, diperoleh dari nilai rata-rata Kepemilikan Manajerial tahun 2020 sebesar 4,9753, tahun 2021 sebesar 5,8654, tahun 2022 sebesar 5,8654, kemudian tahun 2023 sebesar 2,9505. Dengan demikian, selama 4 tahun terakhir Kepemilikan Manajerial mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dan nilai tersebut tetap stabil di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan tajam sebesar hampir setengah dari tahun sebelumnya, dari 5,8654 menjadi 2,9505.

Variabel dependen *integrated reporting* yang diukur dengan mengamati ada atau tidaknya suatu item informasi dalam laporan tahunan. Jika item informasi tidak diungkapkan dalam laporan tahunan, diberikan skor 0, dan jika item informasi dimuat dalam laporan tahunan, diberikan skor 1. Skor pengungkapan *integrated reporting* dihitung sebagai rasio antara nilai aktual yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan nilai total berdasarkan daftar periksa. Mempunyai nilai minimum sebesar 0,56 dan nilai maksimum sebesar 0,80. Sementara nilai standar deviasi sebesar 0,06110 dan nilai rata-rata sebesar 0,6837. Maka dapat dinyatakan rata-rata kemampuan perusahaan dalam index LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam Semakin besar jumlah pengungkapan yang dilampirkan dalam *annual report*

perusahaan maka perusahaan tersebut mengindikasikan bahwa sudah melaporkan dalam bentuk *integrated reporting*.

Berdasarkan nilai rata-rata *integrated reporting* menunjukkan selama 4 tahun mengalami kondisi yang stabil dan konsisten. Diperoleh *integrated reporting* tahun 2020 sebesar 0.69, tahun 2021 sebesar 0.69, tahun 2022 sebesar 0.68, tahun 2023 sebesar 0.69. Dengan demikian, selama 4 tahun terakhir kemampuan perusahaan dalam menerapkan *integrated reporting* mengalami kondisi yang stabil dan konsisten. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022, namun nilai tersebut kembali ke angka semula pada tahun 2023. Artinya, tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang berarti, sehingga secara umum penerapan *integrated reporting* oleh perusahaan menunjukkan konsistensi tetapi belum mencerminkan adanya pertumbuhan yang nyata.

#### **4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik**

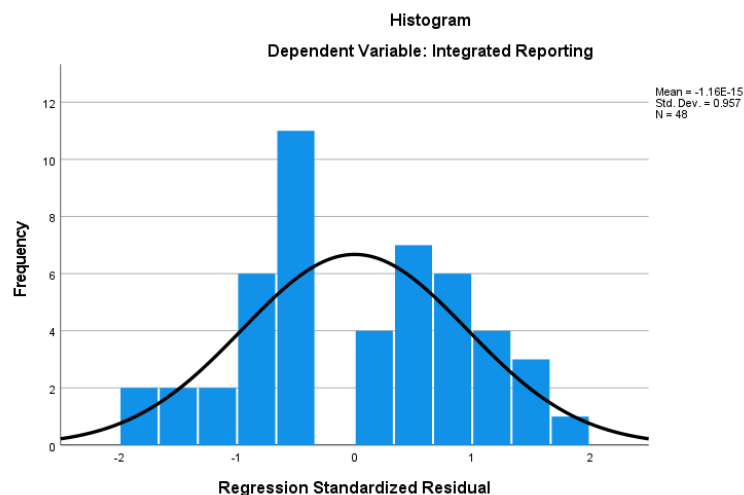
##### **1. Uji Normalitas**

###### **a. Uji Histogram**

Uji Histogram diterapkan bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Normalitas sebuah data dapat dilihat dari persebaran data pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya:

- 1) Data dikatakan berdistribusi normal jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diaonal atau grafik histogramnya
- 2) Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya

**Gambar 4. 1**  
**Grafik Histogram**



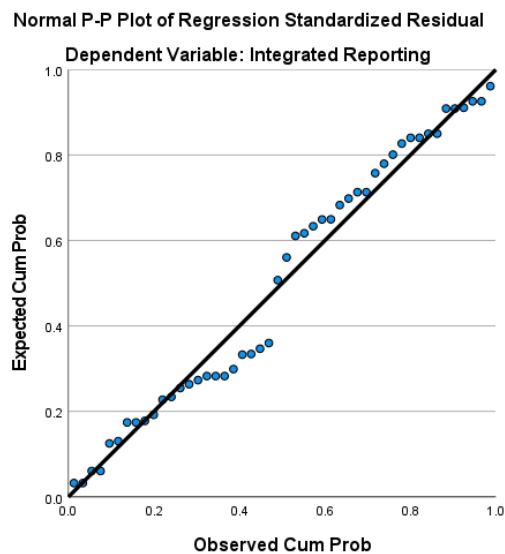
Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Dilihat dari tampilan grafik histogram pada gambar 4.1, maka dapat disimpulkan bahwa pada grafik tersebut memberikan pola distribusi yang mendekati normal.

b. Uji Normalitas Normal P-Plot

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis grafik (normal P-P plot) regresi. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P plot. Jika menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka residual terdistribusi secara normal.

**Gambar 4. 2**  
**Grafik Normal P-Plot**



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Dari gambar grafik Normal P-P Plot di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka residual terdistribusi secara normal.

c. Uji Normalitas Kolmogorov

Menurut Imam Ghozali (2018), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi. Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov - Smirnov (K-S). Data outlier akan digunakan dalam penelitian ini seandainya data penelitian tidak terdistribusi dengan normal atau tidak lolos dalam uji normalitas. Data outlier menurut Ghozali (2018) adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal atau kombinasi.

Uji *Kolmogorov-Smirnov* menggunakan taraf signifikan 0,05, jika data yang diteliti memiliki *level of significance* sama atau di atas 5% ( $\alpha \geq 0.05$ ) maka data tersebut terdistribusi secara normal, sedangkan jika data kurang dari 5% ( $\alpha \leq 0.05$ ) maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

**Tabel 4. 2**  
**Normalitas One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test**  
**(Sebelum di Outlier)**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		48	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.05020969	
Most Extreme Differences	Absolute	.126	
	Positive	.126	
	Negative	-.095	
Test Statistic		.126	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.054	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.055	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.049
		Upper Bound	.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data kedalam skor standardized atau yang biasa disebut z -score (Ghozali, 2018).

Dari tabel 4.2 dengan N = 48 data dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,126. Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 0,054 yang berarti data belum berdistribusi dengan normal,

karena nilai signifikansinya masih dibawah 0,05. Setelah itu yang dilakukan adalah membuang data-data ekstrim yang menyebabkan data berdistribusi tidak normal dengan cara di outlier. Berikut ini hasil uji normalitas yang kedua diperoleh tampak dalam Tabel 4.3 setelah outlier :

**Tabel 4. 3**  
**Normalitas One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test**  
**(Setelah di Outlier)**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardiz ed Residual	
N		45	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0021788	
	Std. Deviation	.05112686	
Most Extreme Differences	Absolute	.108	
	Positive	.105	
	Negative	-.108	
Test Statistic		.108	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.188	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.178
		Upper Bound	.198

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Hasil uji normalitas dengan alat bantu SPSS 27 yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 di atas diperoleh hasil uji normalitas setelah di outlier dari sampel 48 terdapat 3 sampel yang harus dieliminasi dan 45 sampel lainnya dinyatakan

berdistribusi normal, dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut dengan nilai residual berdistribusi normal sebagaimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau ( $0,200 > 0,05$ ).

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi korelasi linear yang sempurna atau mendekati sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya.

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari Variation Inflation Factor (VIF) sebagai berikut:

1. Jika angka *tolerance* diatas 0,1 dan  $VIF < 10$  dikatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas.
2. Jika angka *tolerance* dibawah 0,1 dan  $VIF > 10$  dikatakan terdapat gejala multikolinieritas.

Hasil Uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 4**  
**Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.474	.075		6.310	<.001		
	Komite Audit	.003	.005	.065	.494	.624	.892	1.121
	Komisaris Independen	-.065	.055	-.148	-1.167	.250	.963	1.039
	Kepemilikan Institusional	.380	.123	.410	3.086	.004	.879	1.137
	Kepemilikan Manajerial	.002	.001	.360	2.590	.013	.800	1.250

a. Dependent Variable: Integrated Reporting

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan table 4.4 diatas hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial masing-masing lebih besar dari 0.1, dan nilai VIF masing-masing lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi dalam penelitian ini.

### 3. Uji Heterokedastisitas

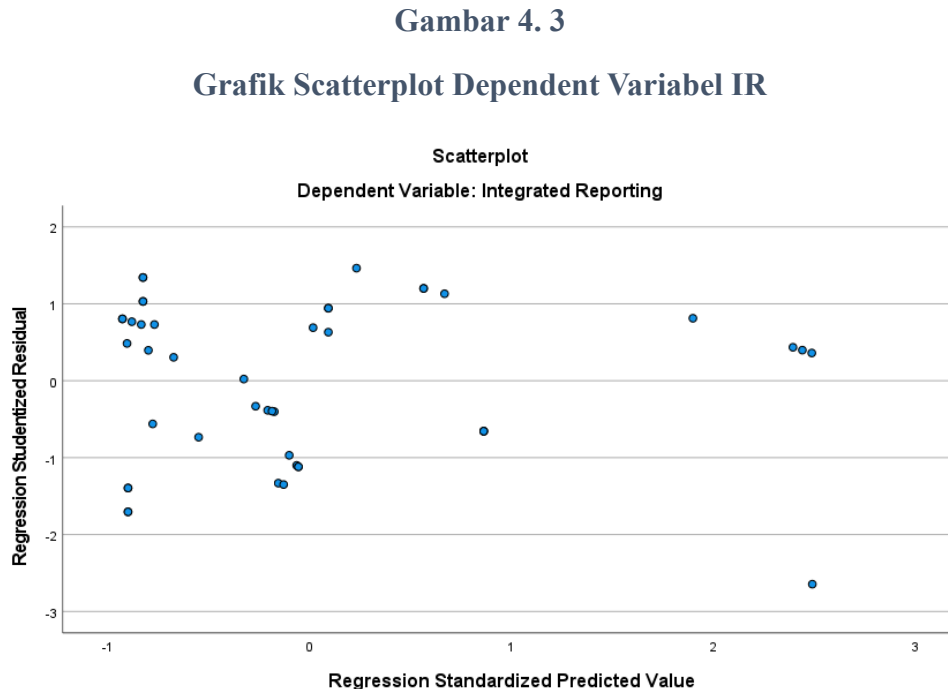
#### a) Metode Scatter Plot

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pola pada grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan variabel residual (SRESID) dapat menggambarkan ada atau tidak adanya heteroskedastisitas didalam suatu model regresi.

Analisis model regresi linear berganda pada gambar scatterplot dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika pada scatterplot titik-titiknya menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka nol) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.
- b. Jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar, maupun bergelombang, maka terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan bantuan SPSS 27 ditunjukkan pada gambar 4.3 di bawah ini:



Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Uji Berdasarkan grafik plot seperti gambar di atas, antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Pada penelitian ini digunakan ujin Durbin-Waston (DW tast) untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi pada model regresi yang diuji.

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Uji Autokolerasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Dyrbin-Watson
1	.749	.562	.504	.04410	1.660

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisararis Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

b. Dependent Variable: Integrated Reporting

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan nilai DW yang diperoleh sebesar 1.660 maka untuk mengetahui lebih lanjut hasil analisis autokorelasi, perlu diketahui bahwa jika  $d < d_l$  atau  $d > 4 - d_l$  artinya terdapat autokorelasi, dan jika  $d_l < d < d_u$  atau  $4 - d_u < d < 4 - d_l$  artinya tidak memiliki autokorelasi.

Persamaan  $d_w$ ,  $d_l$  dan  $d_u$  dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 6**  
**Persamaan DW, DL, dan DU**

d	dL	dU	4-dL	4-dU
1.660	1.3357	1.7200	2.6643	2..2800

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan  $d_u < d < 4 - d_l$  adalah  $1.7200 < 1.660 < 2.6643$ , dimana nilai  $d$  terletak antara nilai  $d_u$  (batas atas) dan nilai  $d_l$  (batas bawah), maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah autokolerasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Cara mencari DL dan DU

Diketahui :

$n = 45$  (Jumlah data)

$k = 4$  (Variabel Independen)

$dL = 1.3357$

$dU = 1.7200$

## 4.6 Pengujian Hipotesis

### 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau *predictor*. Berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan baik untuk variabel terikat (Y) maupun variabel bebas (X1, X2, X3, X4) yang diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS maka diperoleh hasil perhitungan regresi linear berganda sebagai berikut:

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.474	.075		6.310	<.001
	Komite Audit	.003	.005	.065	.494	.624
	Komisaris Independen	-.065	.055	-.148	-1.167	.250
	Kepemilikan Institusional	.380	.123	.410	3.086	.004
	Kepemilikan Manajerial	.002	.001	.360	2.590	.013

a. Dependent Variable: Integrated Reporting

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2025

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan suatu model persamaan regresi linear berganda, sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$Y = 0.474 + 0,003 \text{ Komite Audit} - 0,065 \text{ Komisaris Independent} + 0,380 \text{ kepemilikan Institusional} + 0,002 \text{ Kepemilikan Manajerial} + e$

Dimana:

Nilai konstanta ( $a$ ) sebesar 0,474 mempunyai arti bahwa jika perubahan komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial bernilai nol, maka nilai dari variabel dependen (*Integrated Reporting*) diperkirakan sebesar 0.474.

Koefisien  $b_1 = 0,003$  artinya koefisien regresi Komite audit ( $X_1$ ) diperoleh sebesar 0,003 dengan tanda positif. Hal ini apabila Komite Audit dinaikkan sebesar 1 satuan, maka *Integrated Reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 0,003 dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Koefisien  $b_2 = -0,65$  artinya koefisien regresi Komisaris Independen ( $X_2$ ) diperoleh sebesar 0,65 dengan tanda Negatif. Hal ini apabila Komisaris Independen dinaikkan sebesar 1 satuan, maka Komisaris Independen akan meningkat sebesar -0,65 dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Koefisien  $b_3 = 0,380$  artinya koefisien regresi Kepemilikan Institusional ( $X_3$ ) diperoleh sebesar 0,380 dengan tanda positif. Hal ini apabila Kepemilikan Institusional dinaikkan sebesar 1 satuan, maka *Integrated Reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 0,380 dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Koefisien  $b_4 = 0,002$  artinya koefisien regresi Kepemilikan Manajerial ( $X_4$ ) diperoleh sebesar 0,002 dengan tanda positif. Hal ini apabila

Kepemilikan Manajerial dinaikan sebesar 1 satuan, maka Integrated Reporting akan mengalami peningkatan sebesar 0,002 dengan asumsi variabel lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

#### 5. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji parsial dapat dilakukan melalui statistik Uji t dengan cara membandingkan nilai Sig. t dengan nilai Alpha 0,05 dan juga t hitung dengan t tabel dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai Sig.  $< 0,05$  atau t hitung  $> t$  tabel, maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai Sig.  $> 0,05$ , atau t hitung  $< t$  tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan sampel sebanyak 45, variabel independen 4 dan taraf nyata sebesar 5%, maka didapatkan t tabel sebesar  $(\alpha / 2 ; n-k-1) = (0,025; 45 - 4 - 1) = (0,025; 40) = 2,02108$

Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS pada tabel diatas, maka hasilnya dapat dirangkum, sebagai berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Hasil pengujian parsial (Uji T)**

Model		t	Sig.
1	(Constatnt)	6.310	<.001
	Komite Audit	.494	.624
	Komisaris Independen	-1.167	.250
	Kepemilikan Institusional	3.086	.004
	Kepemilikan Manajerial	2.590	.013

a. Dependent Variable Integrated Reporting

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS pada tabel hasil pengujian parsial (Uji t) diatas, maka hasilnya dapat dirangkum, sebagai berikut:

1) Pengaruh Komite Audit terhadap *Integrated Reporting*.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel komite audit(X1) memiliki t hitung sebesar 0,494 dengan signifikansi sebesar 0,624  $> 0,05$  atau t hitunga  $0,494 < t$  tabel 2,02108. Dapat disimpulkan hasil uji ini dinyatakan hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak, artinya bahwa secara parsial Komite Audit tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

2) Pengaruh komisaris Independen terhadap *Integrated Reporting*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Komiaris Independen (X2) memiliki t hitung sebesar -1,167 dengan signifikansi sebesar  $0,250 > 0,05$  atau t hitunga  $1,167 < t$  tabel

2,02108. Dapat disimpulkan hasil uji ini dinyatakan hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak, artinya bahwa secara parsial Komisaris Independen tidak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

3) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Integrated Reporting*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Kepemilikan Institusional (X3) memiliki t hitung sebesar 3,086 dengan signifikansi sebesar  $0,004 < 0,05$  atau t hitung  $3,086 > t$  tabel 2,02108. Dapat disimpulkan hasil uji ini dinyatakan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, artinya bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan Kepemilikan Institusional terhadap *Integrated Reporting*.

4) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Integrated Reporting*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel Kepemilikan Manajerial (X4) memiliki t hitung sebesar 2,590 dengan signifikansi sebesar  $0,013 < 0,05$  atau t hitung  $2,590 > t$  tabel 2,02108. Dapat disimpulkan hasil uji ini dinyatakan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) diterima, artinya bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan Kepemilikan Manajerial terhadap *Integrated Reporting*.

## 6. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu Komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial menjelaskan variasi variabel yaitu *integrated reporting*. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *adjusted R square*, yang ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749	.562	.504	.04410

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

b. Dependent Variable: Integrated Reporting

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,504 atau 50,4%. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial pada perusahaan index LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dapat menjelaskan variabel dependen yaitu variabel *Integrated Reporting* (Y) adalah sebesar 50,4% dan sisanya sebesar 49,6% (100% - 50,4%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian seperti Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage atau Struktur Modal.

#### 4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil Uji Hipotesis 1: Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat dalam tabel maka diperoleh hasil bahwa komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Integrated Reporting*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,624 > 0,05$  sehingga hipotesis menyatakan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nabila et al., 2023) dan (Prmaisella & Lestari, 2023) yang menyatakan bahwa Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Integrated Reporting* karena fokus utama mereka masih terbatas pada pengawasan laporan keuangan tradisional yang bersifat historis dan finansial. Hal ini menyebabkan perhatian terhadap informasi non-keuangan seperti aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang menjadi inti dari *Integrated Reporting* kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, banyak anggota komite audit yang belum memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam isu keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi, sehingga mereka belum mampu berkontribusi secara efektif dalam pengembangan IR yang menuntut pemahaman lintas bidang.

Dalam praktiknya, pelaksanaan *Integrated Reporting* lebih banyak dikendalikan oleh unit lain seperti divisi keberlanjutan, komunikasi korporat, atau strategi, yang memiliki kapasitas dan pemahaman lebih mendalam mengenai pelaporan nilai jangka panjang. Komite audit cenderung hanya menerima hasil akhir pelaporan, tanpa terlibat aktif dalam perumusannya. Selain itu, *Integrated Reporting* di sebagian besar perusahaan masih dianggap sebagai pelaporan tambahan atau pelengkap dari laporan tahunan, bukan sebagai bagian inti dari sistem pelaporan korporat. Pandangan ini memperkuat keterbatasan peran komite audit dalam mendorong pelaksanaan IR secara substansial dan strategis.

Namun bertolak belakang dengan (Wijaya & Agustina, 2021) dan (Rejeki & Ahmar, 2022) yang menyatakan komite audit berpengaruh terhadap *integrated reporting*. Komite audit bertugas mengawasi proses audit laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan, serta menilai konsistensi laporan dan kualitas auditor eksternal (KNKG, 2006). Dengan peran tersebut, komite audit berpotensi mempengaruhi *Integrated Reporting*.

2) Hasil Uji Hipotesis 2 : Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat dalam tabel maka diperoleh hasil bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,250 > 0,05$ .

Sehingga hipotesis menyatakan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilia Damayanti et al., 2023) dan (Moeljadi et al., 2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *integrated reporting*. Komisaris independen mempunyai tugas dalam mengawasi kebijakan pengurusan jalannya pengelolaan, baik yang berkaitan dengan perusahaan, kegiatan bisnis perusahaan maupun pemberian saran kepada dewan direksi. Oleh karena itu, komisaris independen tidak memiliki pengaruh pada pelaporan terintegrasi karena hanya bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dewan direksi dalam perannya sebagai pelaksana atau manajer manajemen korporasi (Qashash et al., 2020).

Minimal 30% komisaris perusahaan harus independen agar dapat mematuhi peraturan No. 57/POJK.04/2017 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Namun, jumlah komisaris yang independen hanya berfungsi untuk pemenuhan syarat-syarat dan bahwa bisnis memenuhi tanggungjawabnya dalam hal tata kelola perusahaan (Adiwibowo & Ifnapiya, 2020). Ketika ada lebih sedikit komisaris independen daripada anggota dewan komisaris, tanggung jawab pengawasan dan pengambilan keputusan komisaris independen menjadi melemah/tidak efektif. Ketidak efektifan fungsi pengawasan tersebut mengakibatkan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan kepada para pemangku kepentingan menjadi tidak menyeluruh

dan akan berpengaruh pada tingkat pengungkapan informasi yang berkaitan dengan keseluruhan aktivitas perusahaan melalui *integrated reporting*.

Peran komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan umumnya bersifat luas dan umum, yakni mengawasi jalannya manajemen secara keseluruhan tanpa memiliki fokus khusus pada sistem pelaporan terintegrasi. Fungsi pengawasan mereka lebih diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan kepentingan pemegang saham, sehingga tidak secara langsung mendorong pengembangan kualitas *Integrated Reporting*. Di samping itu, banyak komisaris independen yang belum memiliki kompetensi teknis atau pemahaman yang memadai mengenai isu-isu keberlanjutan, nilai jangka panjang, maupun pendekatan pelaporan berbasis nilai (*value creation*), sehingga keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pengawasan *Integrated Reporting* menjadi terbatas.

Pelaksanaan *Integrated Reporting* di perusahaan umumnya lebih banyak digerakkan oleh manajemen aktif terutama oleh divisi khusus seperti departemen keberlanjutan, keuangan, atau komunikasi korporat yang memiliki sumber daya dan keahlian yang relevan. Hal ini menyebabkan peran komisaris independen dalam mendorong atau mengevaluasi IR menjadi kurang dominan. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan sering kali masih bersifat formalitas, yaitu sekadar untuk memenuhi persyaratan peraturan pasar modal tanpa diiringi dengan keterlibatan yang aktif dan mendalam dalam proses tata kelola strategis, termasuk dalam pengembangan *Integrated Reporting*. Akibatnya, potensi kontribusi mereka dalam

meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelaporan perusahaan belum sepenuhnya terealisasi.

Namun bertolak belakang dengan (Wijaya & Agustina, 2021) dan (Aprilia Damayanti et al., 2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *Integrated Reporting* karena perannya dalam mendorong pengungkapan yang lebih luas melalui prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya *responsibility*, sehingga berpotensi mempengaruhi *Integrated Reporting*.

3) Hasil Uji Hipotesis 3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat dalam tabel maka diperoleh hasil bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Sehingga hipotesis menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting* karena investor institusional, seperti manajer aset, dana pensiun, atau lembaga keuangan, umumnya menuntut tingkat transparansi yang tinggi serta pelaporan strategis yang mencerminkan kinerja jangka panjang dan nilai perusahaan secara menyeluruh. Mereka cenderung memerlukan informasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan. Selain itu, keberadaan

pemilik institusional mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik tata kelola dan akuntabilitas karena tekanan dari pemilik modal yang memiliki kekuatan dan kepentingan besar terhadap keberlanjutan bisnis.

Tidak hanya itu, kepemilikan institusional juga berkontribusi dalam mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan melalui dorongan untuk menyampaikan laporan yang lebih transparan, konsisten, dan bernilai tambah, seperti yang diwujudkan dalam *Integrated Reporting*. Laporan yang komprehensif ini memudahkan investor untuk menilai prospek jangka panjang perusahaan secara lebih akurat. Di sisi lain, investor institusional umumnya juga mendukung inisiatif keberlanjutan dan penguatan reputasi perusahaan di mata publik dan pasar, sehingga mereka mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik pelaporan terintegrasi sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Dengan adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen, dimana keberadaan kepemilikan ini dapat dilihat cukup mampu untuk menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan institusional merupakan salah satu dari mekanisme dari *corporate governance* di dalam perusahaan. Menurut teori agensi semakin besar proporsi kepemilikan institusional di dalam sebuah perusahaan maka akan meningkatkan Tingkat pengawasan terhadap agen (Jensen & Meckling, 1976).

Ketika sebuah perusahaan memiliki investor institusional yang signifikan, maka lebih mampu menghilangkan konflik agensi antara manajemen dan prinsipal. Hal ini karena investor institusi memainkan peran kunci dalam tata kelola perusahaan, membatasi kemampuan manajemen untuk mengambil tindakan oportunistik. Dengan demikian, dengan adanya kepemilikan institusional maka dapat memberikan dorongan agar perusahaan dapat mengungkapkan dan menyajikan pelaporan yang lebih komprehensif dan transparan terkait operasional perusahaan sehingga dapat digunakan oleh seluruh *stakeholders* (Aprilia Damayanti et al., 2023)

Namun bertolak belakang dengan penelitian (Moeljadi et al., 2022) dan (Uyun, Ratno Agriyanto, 2020) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *integrated reporting*. Tinggi rendahnya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tidak membuat perusahaan memberikan informasi yang lengkap dan terpadu seperti *integrated reporting*. Sehingga Kepemilikan Institusional tidak dapat mempengaruhi *Integrated Reporting*.

4) Hasil Uji Hipotesis 4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *Integrated Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat dalam tabel maka diperoleh hasil bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi

0,013 < 0,05. Sehingga hipotesis menyatakan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *Integrated Reporting*.

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Integrated Reporting* karena ketika manajer memiliki saham dalam perusahaan, tercipta keselarasan (*alignment*) antara kepentingan manajemen dan pemegang saham. Dengan adanya kepentingan finansial langsung, manajer cenderung lebih terdorong untuk mengambil keputusan yang menciptakan nilai jangka panjang dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Hal ini pada gilirannya mendorong mereka untuk menyusun laporan yang mencerminkan kinerja strategis secara menyeluruh, sebagaimana dimuat dalam *Integrated Reporting*. Selain itu, kepemilikan saham oleh manajemen meningkatkan rasa tanggung jawab atas kinerja perusahaan, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, serta komitmen terhadap aspek keberlanjutan yang semakin menjadi perhatian pemangku kepentingan.

Dengan keterlibatan langsung dalam kepemilikan, manajer memiliki insentif kuat untuk menyampaikan informasi yang lebih terbuka dan akurat guna mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor. Praktik pelaporan terintegrasi yang komprehensif memungkinkan penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan secara holistik, yang pada akhirnya turut memperkuat citra dan reputasi perusahaan di mata publik dan pasar modal. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam mendorong adopsi dan kualitas *Integrated Reporting*.

Penelitian ini didukung oleh penelitian (Permana et al., 2023) yang menunjukkan bahwa manajemen percaya pada apresiasi saham perusahaan di masa depan dan bersedia mengambil risiko dengan menginvestasikan sejumlah besar saham perusahaan. Harga saham naik karena kepemilikan manajerial yang tinggi karena investor percaya manajer akan berkinerja baik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pasar terhadap prospek perusahaan, sehingga menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Nilai kepemilikan manajerial yang tinggi juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena manajemen lebih termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan karena kepentingan pribadi mereka terkait dengan kinerja perusahaan.

(Hasibuan, 2022) menyatakan bahwa Kepemilikan manajerial akan berdampak pada bidang pengungkapan sukarela atau terintegrasi karena akan membuat manajer cenderung bertindak dengan cara yang akan memaksimalkan keuntungan keuangan mereka sendiri dan lebih mungkin bagi mereka untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepemilikan manajemen yang tinggi akan menyebabkan perusahaan mengungkapkan *integrated reporting* mereka secara lebih menyeluruh,

Namun bertolak belakang dengan penelitian(Wahyudin, 2020) dan (Akmal & Lestari, 2023) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *integrated reporting*. Pengungkapan jumlah kepemilikan manajerial dalam *integrated reporting* tidak mampu

meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *Integrated Reporting*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 8.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* terhadap Tingkat Keselarasan Laporan Tahunan dengan Rerangka *Integrated Reporting* (IR). Struktur GCG terdiri dari Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan index LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *integrated reporting* karena fokus utamanya masih pada laporan keuangan tradisional, kurang kompeten dalam isu keberlanjutan, dan minim keterlibatan dalam penyusunan IR.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *integrated reporting*. karena peran pengawasannya masih bersifat formal dan belum mendorong pengungkapan laporan secara menyeluruh.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *integrated reporting*. karena semakin besar kepemilikan, semakin kuat pengawasan terhadap manajemen dan dorongan untuk menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *integrated reporting*. Semakin besar kepemilikan manajemen, semakin tinggi dorongan untuk meningkatkan transparansi demi menjaga kepercayaan investor dan nilai perusahaan.

## 8.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Perusahaan

Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 disarankan untuk terus meningkatkan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Hal ini penting untuk mendorong penyusunan Integrated Reporting yang lebih komprehensif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

## 2. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Investor diharapkan memperhatikan kualitas penerapan GCG dan keterbukaan informasi dalam Integrated Reporting sebelum mengambil keputusan investasi. Hal ini dapat menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan dan kinerja jangka panjang perusahaan.

## 3. Bagi Regulator (OJK dan BEI)

Otoritas terkait diharapkan dapat terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam menyajikan laporan yang transparan dan berintegritas. Selain itu, regulator dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi perusahaan yang konsisten menyusun Integrated Reporting sesuai standar internasional.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mendatang dapat memperluas ruang lingkup dengan menggunakan sampel perusahaan di luar indeks LQ45 atau memperpanjang periode penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih bervariasi dan generalisasi dapat ditingkatkan. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti sustainability performance atau environmental, social, and governance (ESG) untuk memperkaya hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- (IAPI), I.A.P.I. (2021) *Terintegrasi 2021*. Available at: <https://iapi.or.id/>.
- Akmal, A.A. and Lestari, T.U. (2023) ‘Pengaruh Profitabilitas , Kepemilikan Manajerial , dan Gender Diversity Terhadap Penerapan Integrated Reporting’, 7, pp. 3530–3540.
- Anugrah, M. *et al.* (2025) ‘Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Audit Committee Expertise Terhadap Integritas Laporan Keuangan’, *Jambura Economic Education Journal*, 7(1), pp. 198–209.
- Aprilia Damayanti, I Gusti Ketut Agung Ulupui and Indah Muliasari (2023) ‘Pengaruh Corporate Governance Terhadap Integrated Reporting’, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 3(3), pp. 744–765. Available at: <https://doi.org/10.21009/japa.0303.12>.
- Bangun, A. br (2022) ‘Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Sustainability Report Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 Skripsi Oleh : Alfiannisa Br Bangun Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan Terdaftar Di Bursa Efek Indone’.
- Chariri, A. (2019) ‘Pola Pelaporan Terintegrasi : Studi Banding Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Johannesburg Dan Saham Indonesia Bursa’, *Jurnal Reviu Sebuah Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.39>.
- Cooray, T., Gunarathne, A.D.N. and Senaratne, S. (2020) ‘Does corporate governance affect the quality of integrated reporting?’, *Sustainability (Switzerland)*, 12(10). Available at: <https://doi.org/10.3390/su12104262>.
- Diah, N.P.A. (2007) ‘Implementasi Prinsip Good Corporate Governance

Pada Kegiatan Tentang Perseroan Terbatas Ni Putu Ayu Diah Novianti Universitas Udayana , Bali , Indonesia Email : putuayudiahnovianti@gmail.com Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Kegiatan Pen', *jurnal cahaya mandalika*, (40), pp. 791–801.

Dwiridotjahjono, J. (2010) 'Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia', 5(2), pp. 101–112.

Elshandidy, T. (2022) 'The Impact of Corporate Governance on the Quality of Integrated Reporting: International Evidence', *Tamer Elshandidy / Journal of Asian Finance*, 9(6), pp. 127–0137. Available at: <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no6.0127>.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2001). Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) di Indonesia. Jakarta: FCGI.

Haniffah, N. (2021) 'Pengaruh Komite Audit , Ukuran Perusahaan ',.

Ghozali, Imam. "Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23." (2018).

Jonathan, Sarwono. "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif." (2006).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta: KNKG.

Lodovicus Lasdi, E.L.O. (2021) 'Dampak Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Tekanan Pemangku Kepentingan Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Terpadu Pelaporan', *Jafa*, 8(2), pp. 117–133. Available at: <https://doi.org/10.21512/jafa.v8i2.8292>.

Moeljadi, M., Angelina, N. and Pangestu, S. (2022) 'Determinan dan Konsekuensi Pengungkapan Integrated Reporting', *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(2), pp. 200–220. Available at:

<https://doi.org/10.24167/jab.v20i2.4635>.

Nabila, Zakaria, A. and Purwohedhi, U. (2023) ‘Pengaruh Profitabilitas, Komite Audit, Pergantian Auditor, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan’, *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 4(1), pp. 189–206. Available at: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

Necib, A. and Anis, J. (2023) ‘*The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Integrated Reporting (IR) Quality: The Case of FTSE100 Companies*’, *International Journal of Finance, Insurance and Risk Management*, 13(Issue 2), pp. 105–131. Available at: <https://doi.org/10.35808/ijfirm/358>.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2015). G20/OECD Principles of Corporate Governance.

Permana, S., Aruddy, A. and Jahroh, S. (2023) ‘The Effect of Good Corporate Governance on Company Value Moderated By Integrated Reporting’, *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 9(3), pp. 805–818. Available at: <https://doi.org/10.17358/jabm.9.3.805>.

Permata, S., JMV, M. and Edy, S. (2020) ‘Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas terhadap Integrated Reporting dengan Auditor Eksternal sebagai Variabel Moderasi’, *Jurnal Ekobisman*, 4(3), pp. 166–182.

Pramaisella, V. and Lestari, T.U. (2023) ‘Pengaruh Gender Diversity, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Integrated Reporting (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)’, *e-Proceedings of Management*, 10(4), pp. 2131–2142.

Pratiwi, D. *et al.* (2023) ‘Companies in Indonesia Towards the Implementation of Integrated Reporting’, 3(6), pp. 334–346.

Rejeki, D. and Ahmar, N. (2022) ‘Studi Literatur Review : Pentingnya

- Penerapan Integrated Reporting (Ir)', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), pp. 151–163. Available at: <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2323>.
- Rizkiyatil Holishah (2021) 'Pentingnya Mekanisme Good Corporate Governance Guna Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan Go Public (Non Keuangan) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia'.
- Sugihani, N. and Wijayanti, R. (2022) 'Pengungkapan Integrated Reporting: Keterlibatan Stakeholder Dan Mekanisme Corporate Governance', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.*, 4(6), pp. 2135–2148. Available at [:http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1765](http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1765).
- Sugiyono, P. D. "metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan)." *Metode Penelitian Pendidikan* 67 (2019): 18.
- Tambunan, S. *et al.* (2022) 'the Impact of Corporate Governance on the Integrated Reporting Quality of Indonesian Listed Firms: Moderating Role of Csr Disclosure and Corporate Sustainability', *International Journal of Economics and Finance Studies*, 14(4), pp. 252–274. Available at: <https://doi.org/10.34109/ijefs.20220113>.
- Utami, K., Amyulianthy, R. and Astuti, T. (2022) 'Good Corporate Governance and Integrated Reporting Implementation of Rev. 4.0', *Journal of Economics and Business*, 5(4). Available at: <https://doi.org/10.31014/aior.1992.05.04.476>.
- Uyun, Ratno Agriyanto, & D. (2020) 'Pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional dan umur perusahaan terhadap integrated reporting', pp. 95–109.
- Wahyudin, Y. (2020) 'Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Institusi dan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Peran

Integrated Reporting Sebagai Pemoderasi’, 7(2), pp. 177–184.

Wijaya, F. and Agustina, F. (2021) ‘Pengaruh Elemen-Elemen Good Corporate (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019)’, *Jurnal TECHNOBIZ*, 4(2), pp. 93–100.

Yulyan, M., Yadiati, W. and Aryonindito, S. (2021) ‘The Influences of Good Corporate Governance and Company Age on Integrated Reporting Implementation’, *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), pp. 100–109. Available at: <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31761>.

<https://www.tempo.co/ekonomi/perbedaan-komisaris-dan-komisaris-independen-di-perusahaan-bumn-48182> 18 Juni 2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

## LAMPIRAN

### Data Penelitian

Tahun	Kode	Komite Audit (X1)	Komisaris Independen (X2)	Kepemilikan Institusional (X3)	Kepemilikan Manajerial (X4)	Integrated Reporting (Y)
2020	ANTM	4	0.3	0.65	0.0968	0.77
	ASII	4	0.3	0.50	0.0006	0.58
	BBCA	3	0.6	0.55	0.0018	0.72
	BBNI	5	0.6	0.88	0.0952	0.69
	BBRI	8	0.6	0.57	0.0001	0.67
	BBTN	4	0.5	0.60	0.0001	0.61
	BMRI	7	0.5	0.60	0.0002	0.73
	INDF	3	0.4	0.50	0.0002	0.69
	PTBA	4	0.3	0.66	24.5211	0.80
	TLKM	7	0.4	0.56	0.0169	0.66
	TOWR	3	0.4	0.52	0.0079	0.63
UNTR	3	0.3	0.59	34.9625	0.69	
		5	0.4	0.60	4.9753	0.69
2021	ANTM	4	0.6	0.65	0.2497	0.77
	ASII	4	0.6	0.50	0.0003	0.56
	BBCA	3	0.6	0.55	0.0018	0.7
	BBNI	5	0.7	0.89	0.0003	0.69
	BBRI	8	0.6	0.53	0.0001	0.67
	BBTN	5	0.6	0.60	0.0005	0.63
	BMRI	7	0.5	0.60	0.0003	0.72
	INDF	3	0.4	0.50	0.0002	0.69
	PTBA	4	0.3	0.66	35.1456	0.80
	TLKM	6	0.4	0.57	0.0160	0.66
	TOWR	3	0.4	0.54	0.0079	0.63
UNTR	3	0.3	0.59	34.9625	0.69	
		5	0.5	0.60	5.8654	0.68
2022	ANTM	4	0.4	0.65	0.2497	0.77
	ASII	4	0.4	0.50	0.0003	0.58
	BBCA	3	0.6	0.55	0.0015	0.72
	BBNI	5	0.7	0.91	0.0003	0.69
	BBRI	7	0.6	0.53	0.0001	0.67

	BBTN	6	0.6	0.60	0.0008	0.61
	BMRI	7	0.5	0.60	0.0005	0.73
	INDF	3	0.4	0.50	0.0002	0.69
	PTBA	4	0.3	0.66	35.1456	0.80
	TLKM	6	0.4	0.56	0.0166	0.66
	TOWR	3	0.4	0.59	0.0063	0.63
	UNTR	3	0.3	0.59	34.9625	0.69
		5	0.5	0.60	5.8654	0.69
2023	ANTM	4	0.4	0.65	0.2497	0.77
	ASII	4	0.4	0.50	0.0006	0.56
	BBCA	3	0.6	0.55	0.0014	0.7
	BBNI	5	0.6	0.92	0.0003	0.69
	BBRI	7	0.7	0.53	0.0001	0.67
	BBTN	5	0.6	0.60	0.0014	0.73
	BMRI	7	0.5	0.60	0.0007	0.72
	INDF	3	0.4	0.50	0.0002	0.69
	PTBA	4	0.3	0.66	37.1456	0.80
	TLKM	6	0.4	0.56	0.0005	0.66
	TOWR	3	0.4	0.59	0.0059	0.63
	UNTR	3	0.3	0.59	0.0001	0.69
		5	0.5	0.60	3.1172	0.69

**Sampel Komite Audit Periode 2020 – 2023**

<b>ANTM</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	4
	2021	4
	2022	4
	2023	4

<b>ASII</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	4
	2021	4
	2022	4
	2023	4

<b>BBCA</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3

<b>BBNI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	5
	2021	5
	2022	5
	2023	5

<b>BBRI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	8
	2021	8
	2022	7
	2023	7

<b>BBTN</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	4
	2021	5
	2022	6
	2023	5

<b>BMRI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	7
	2021	7
	2022	7
	2023	7

<b>INDF</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3

<b>PTBA</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	4
	2021	4
	2022	4
	2023	4

<b>TLKM</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	7
	2021	6
	2022	6
	2023	6

<b>TOWR</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3

<b>UNTR</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total komite Audit</b>
	2020	3
	2021	3
	2022	3
	2023	3

**Sampel Komisaris Independen Periode 2020 – 2023**

	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Komisaris Independen</b>
<b>ANTM</b>	2020	2	6	0.3
	2021	3	5	0.6
	2022	2	5	0.4
	2023	2	5	0.4

	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Komisaris Independen</b>
<b>ASII</b>	2020	4	10	0.4
	2021	4	10	0.4
	2022	4	10	0.4
	2023	4	10	0.4

	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Komisaris Independen</b>
<b>BBCA</b>	2020	3	5	0.6
	2021	3	5	0.6
	2022	3	5	0.6
	2023	3	5	0.6

	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Komisaris Independen</b>
<b>BBNI</b>	2020	6	10	0.6
	2021	7	10	0.7
	2022	7	10	0.7
	2023	7	11	0.6

	Tahun	Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen
<b>BBRI</b>	2020	6	10	0.6
	2021	6	10	0.6
	2022	7	11	0.6
	2023	7	10	0.7

	Tahun	Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen
<b>BBTN</b>	2020	3	6	0.5
	2021	4	7	0.6
	2022	5	9	0.6
	2023	5	9	0.6

	Tahun	Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen
<b>BMRI</b>	2020	5	10	0.5
	2021	5	10	0.5
	2022	5	10	0.5
	2023	6	11	0.5

	Tahun	Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen
<b>INDF</b>	2020	3	8	0.4
	2021	3	8	0.4
	2022	3	8	0.4
	2023	1	8	0.4

	Tahun	Komisaris Independen	Jumlah Dewan Komisaris	Dewan Komisaris Independen
<b>PTBA</b>	2020	2	6	0.3
	2021	2	6	0.3
	2022	2	6	0.3
	2023	2	6	0.3

	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Komisaris Independen</b>
<b>TLKM</b>	2020	4	9	0.4
	2021	4	9	0.4
	2022	4	9	0.4
	2023	4	10	0.4

	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Komisaris Independen</b>
<b>TOWR</b>	2020	2	5	0.4
	2021	2	5	0.4
	2022	2	5	0.4
	2023	2	5	0.4

	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Jumlah Dewan Komisaris</b>	<b>Dewan Komisaris Independen</b>
<b>UNTR</b>	2020	2	6	0.8
	2021	2	6	0.8
	2022	2	6	0.8
	2023	2	6	0.8

**Sampel Kepemilikan Institusional Periode 2020 – 2023**

<b>ANTM</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	15,620,000,000	24,030,764,725	0.65
	2021	15,620,000,000	24,030,764,725	0.65
	2022	15,620,000,000	24,030,764,725	0.65
	2023	15,620,000,000	24,030,764,725	0.65

<b>ASII</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50
	2021	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50
	2022	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50
	2023	20,288,255,040	40,483,553,140	0.50

<b>BBCA</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	13,545,990,000	24,655,010,000	0.55
	2021	67,729,950,000	123,275,050,000	0.55
	2022	67,729,950,000	123,275,050,000	0.55
	2023	67,729,950,000	123,275,050,000	0.55

<b>BBNI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	16,309,687,853	18,629,076,758	0.88
	2021	16,600,085,947	18,623,973,858	0.89
	2022	16,996,724,671	18,648,656,458	0.91
	2023	34,166,738,713	37,256,798,316	0.92

<b>BBRI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	70,000,000,000	123,345,810,000	0.57
	2021	80,610,976,875	151,559,001,604	0.53
	2022	80,610,976,875	151,559,001,604	0.53
	2023	80,610,976,875	151,559,001,604	0.53

<b>BBTN</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	6,354,000,000	10,590,000,000	0.60
	2021	6,354,000,000	10,590,000,000	0.60
	2022	6,354,000,000	10,590,000,000	0.60
	2023	8,420,666,648	14,034,444,413	0.60

<b>BMRI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	28,000,000,000	46,666,666,666	0.60
	2021	28,000,000,000	46,666,666,666	0.60
	2022	28,000,000,000	46,666,666,666	0.60
	2023	56,000,000,000	93,333,333,332	0.60

<b>INDF</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	4,396,103,450	8,780,426,500	0.50
	2021	4,396,103,450	8,780,426,500	0.50
	2022	4,396,103,450	8,780,426,500	0.50
	2023	4,396,103,451	8,780,426,501	0.50

<b>PTBA</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	7,595,650,700	11,520,659,250	0.66
	2021	7,595,650,700	11,520,659,250	0.66
	2022	7,595,650,700	11,520,659,250	0.66
	2023	7,595,650,700	11,520,659,250	0.66

<b>TLKM</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	55,441,733,840	55,575,805,540	0.56
	2021	55,431,392,640	99,062,216,600	0.57
	2022	55,942,022,140	99,062,216,600	0.56
	2023	55,575,805,540	99,062,216,600	0.56

<b>TOWR</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	26,540,619,965	30,315,077,465	0.52
	2021	27,730,046,165	51,014,625,000	0.54
	2022	30,315,077,465	51,014,625,000	0.59
	2023	30,315,077,465	51,014,625,000	0.59

<b>UNTR</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
	2020	2,219,317,358	2,219,317,358	0.59
	2021	2,219,317,358	3,730,135,136	0.59
	2022	2,219,317,358	3,730,135,136	0.59
	2023	2,219,317,358	3,730,135,136	0.59

**Sampel Kepemilikan Manajerial Periode 2020 – 2023**

<b>ANTM</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	2,325,000	24,030,764,725	0.0968
	2021	6,000	24,030,764,725	0.2497
	2022	6,000	24,030,764,725	0.2497
	2023	18,500	24,030,764,725	0.2497

<b>ASII</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	23,523,900	40,483,553,140	0.006
	2021	12,695,600	40,483,553,140	0.003
	2022	11,695,600	40,483,553,140	0.003
	2023	22,559,000	40,483,553,140	0.006

<b>BBCA</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	44,674,462	24,655,010,000	0.0018
	2021	218,768,210	123,275,050,000	0.0018
	2022	181,585,191	123,275,050,000	0.0015
	2023	174,872,403	123,275,050,000	0.0014

<b>BBNI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	1,773,940	18,629,076,758	0.0952
	2021	5,036,947	18,623,973,858	0.0003
	2022	6,352,865	18,648,656,458	0.0003
	2023	11,582,092	37,256,798,316	0.0003

<b>BBRI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	13,828,600	123,345,810,000	0.0001
	2021	17,722,911	151,559,001,604	0.0001
	2022	17,461,185	151,559,001,604	0.0001
	2023	19,689,359	151,559,001,604	0.0001

<b>BBTN</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	1,442,200	10,590,000,000	0.0001
	2021	5,244,300	10,590,000,000	0.0005
	2022	8,311,000	10,590,000,000	0.0008
	2023	19,830,091	14,034,444,413	0.0014

<b>BMRI</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	11,410,700	46,666,666,666	0.0002
	2021	13,305,500	46,666,666,666	0.0003
	2022	21,479,500	46,666,666,666	0.0005
	2023	69,839,700	93,333,333,333	0.0007

<b>INDF</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	1,379,770	8,780,426,500	0.0002
	2021	1,380,020	8,780,426,500	0.0002
	2022	1,380,020	8,780,426,500	1.0002
	2023	1,380,020	8,780,426,500	2.0002

<b>PTBA</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	282,500	11,520,659,250	24.5211
	2021	404,900	11,520,659,250	35.1456
	2022	404,900	11,520,659,250	36.1456
	2023	404,900	11,520,659,250	37.1456

<b>TLKM</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	1,669,677	99,062,216,600	0.0169
	2021	1,589,455	99,062,216,600	0.0160
	2022	1,643,955	99,062,216,600	0.0166
	2023	49,442,999	99,062,216,600	0.0005

<b>TOWR</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	403,787,545	51,014,625,000	0.0079
	2021	404,194,145	51,014,625,000	0.0079
	2022	318,902,835	51,014,625,000	0.0063
	2023	298,510,035	51,014,625,000	0.0059

<b>UNTR</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>	<b>Jumlah saham beredar</b>	<b>Kepemilikan Manajerial</b>
	2020	130,415	3,730,135,136	34.9625
	2021	130,415	3,730,135,136	34.9625
	2022	130,415	3,730,135,136	34.9625
	2023	421,015	3,730,135,136	0.0001

## Lampiran

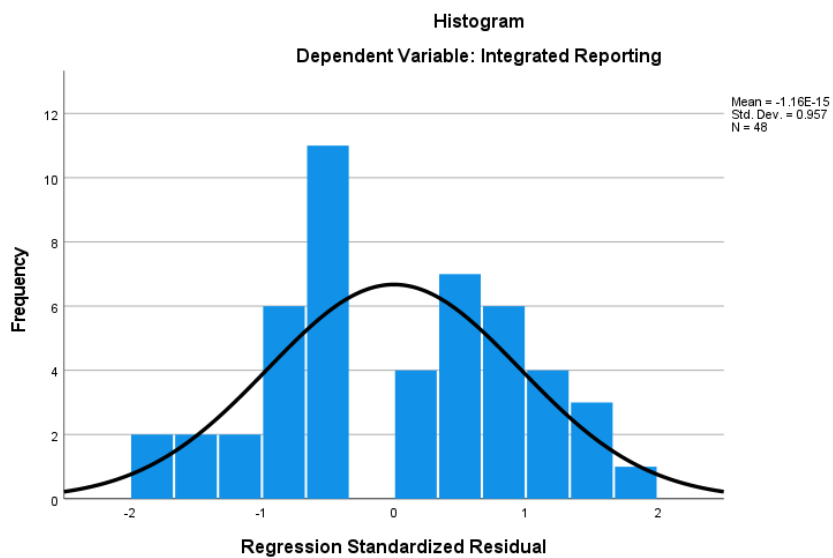
### Data yang sudah diolah oleh peneliti

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif

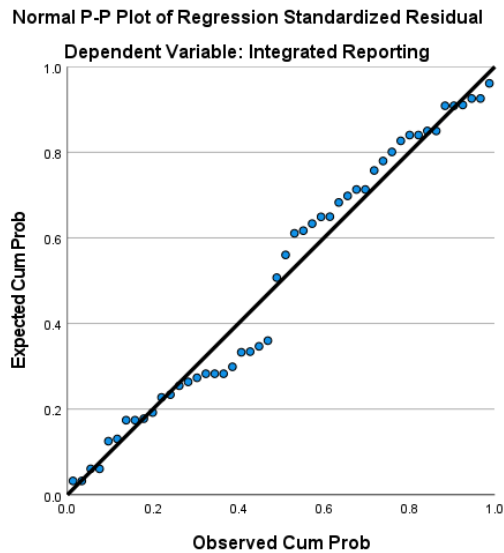
##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	48	3	8	4.56	1.583
Komisaris Independen	48	.33	.83	.5132	.14639
Kepemilikan Instusional	48	.501	.917	.60174	.103279
Kepemilikan Manajerial	48	.0001	37.1456	5.039151	12.1832353
Integrated Reporting	48	.56	.80	.6837	.06110
Valid N (listwise)	48				

#### Grafik Histogram



## Grafik Normal P-Plot



Normalitas One - sample Kolmogrov - Smirnov test (sebelum di outlier)

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		48	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.05020969	
Most Extreme Differences	Absolute	.126	
	Positive	.126	
	Negative	-.095	
Test Statistic		.126	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.054	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.055	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.049
		Upper Bound	.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Normalitas One - sample Kolmogrov - Smirnov test (sesudah di outlier)

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		45	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0021788	
	Std. Deviation	.05112686	
Most Extreme Differences	Absolute	.108	
	Positive	.105	
	Negative	-.108	
Test Statistic		.108	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.188	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.178
		Upper Bound	.198

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

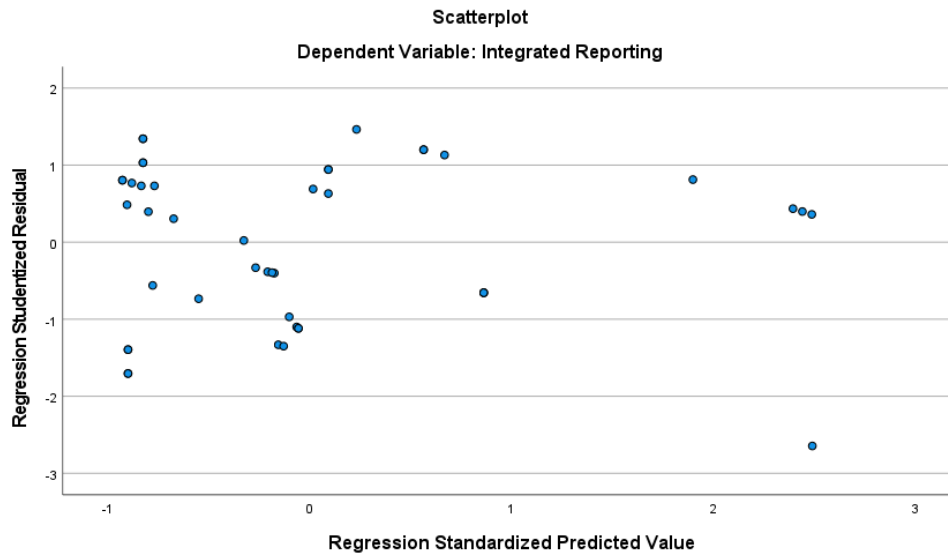
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

### Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.474	.075		6.310	<.001		
	Komite Audit	.003	.005	.065	.494	.624	.892	1.121
	Komisaris Independen	-.065	.055	-.148	-1.167	.250	.963	1.039
	Kepemilikan Institusional	.380	.123	.410	3.086	.004	.879	1.137
	Kepemilikan Manajerial	.002	.001	.360	2.590	.013	.800	1.250

a. Dependent Variable: Integrated Reporting

## Grafik Scatterplot Dependent Variable IR



## Hasil Uji Autokolerasi

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Dyrbin-Watson
1	.749	.562	.504	.04410	1.660

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

b. Dependent Variable: Integrated Reporting

## Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.474	.075		6.310	<.001
	Komite Audit	.003	.005	.065	.494	.624
	Komisaris Independen	-.065	.055	-.148	-1.167	.250
	Kepemilikan Institusional	.380	.123	.410	3.086	.004
	Kepemilikan Manajerial	.002	.001	.360	2.590	.013

a. Dependent Variable: Integrated Reporting

## Hasil Pengujian Parsial (Uji T)

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		t	Sig.
1	(Constant)	6.310	<.001
	Komite Audit	.494	.624
	Komisaris Independen	-1.167	.250
	Kepemilikan Institusional	3.086	.004
	Kepemilikan Manajerial	2.590	.013

a. Dependent Variable Integrated Reporting

## Hasil Uji Koefisien Determinasi

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749	.562	.504	.04410

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial

b. Dependent Variable: Integrated Reporting

Tabel t

Titik Presentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr 0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

**Keterangan:**

Jumlah Data = 45

Tingkat signifikansi = 5%

Df = n - k - 1

Df = 45-4-1

maka didapatkan t tabel sebesar

$(\alpha / 2 ; n-k-1) = ( 0,025; 45 - 4 - 1 ) = (0,0 25; 40) = 2,02108$